

**EVALUASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN  
ADMINISTRASI DESA ELEKTRONIK (PADE) PADA KANTOR  
DESA BRENGKOK KABUPATEN LAMONGAN  
MENGUNAKAN *HUMAN ORGANIZATION TECHNOLOGY*  
(HOT) FIT MODEL**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Komputer

Disusun oleh:

Tiko Bayu Arinda Kusuma

NIM: 115061007111011



PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2016

## PENGESAHAN

EVALUASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA ELEKTRONIK  
(PADE) PADA KANTOR DESA BRENGKOK KABUPATEN LAMONGAN  
MENGUNAKAN HUMAN ORGANIZATION TECHNOLOGY (HOT) FIT MODEL

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Komputer

Disusun Oleh :  
Tiko Bayu Arinda Kusuma  
NIM: 115061007111011

Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan lulus pada  
22 Agustus 2016  
Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ismiarta Aknuranda, S.T., M.Sc., Ph.D.  
NIK: 740719 06 1 1 0079

Aditya Rachmadi, S.ST., M.TI.  
NIK: 860421 16 1 1 0426

Mengetahui  
Ketua Jurusan Sistem Informasi

Herman Tolle, Dr. Eng., S.T., M.T  
NIK: 197408232000121001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang,



Tiko Bayu Arinda Kusuma

NIM: 115061007111011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga skripsi yang berjudul “Evaluasi Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Desa Elektronik (PADE) Pada Kantor Desa Brengkok Kabupaten Lamongan Menggunakan *Human Organization Technology(HOT) Fit Model*” dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan bantuan baik secara langsung maupun tak langsung selama masa pengerjaan skripsi ini. Pihak-pihak yang selalu memberikan dukungan baik secara lahir maupun batin yang selalu ada dalam setiap kesempatan. Rasa terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ismiarta Aknuranda, S.T, M.Sc, Ph.D dan Bapak Aditya Rachmadi S.ST, M.TI selaku dosen pembimbing, yang tanpa kenal lelah selalu membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. Kedua Orang Tua Penulis yang tak henti-hentinya memberikan dukungan materil dan non materil dalam setiap kesempatan sampai dengan terselesaikannya skripsi berikut.
3. Dosen Sistem Informasi yang telah memberikan banyak ilmu dari awal sampai akhir perkuliahan.
4. Bapak Praseno, S.Pd selaku Kepala Desa Brengkok yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian pada Kantor Desa Brengkok
5. Bapak Shobikin selaku Sekretaris Desa yang telah meluangkan banyak waktu dan tenaga dalam pengumpulan data penelitian.
6. Teman-teman Sistem Informasi angkatan 2011 yang telah memberikan semangat serta dukungan.

Malang,

Penulis

T.bayuarinda@gmail.com

## ABSTRAK

Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) merupakan sebuah inovasi baru Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik sektor desa. Proses perencanaan dimulai pada tahun 2008 dan percobaan pada tahun 2013 dengan memilih 42 desa percontohan, salah satunya adalah Kantor Desa Brengkok Kecamatan Brondong. Proses evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan PADE telah sesuai dengan tujuan. Peneliti menerapkan penelitian berbasis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Mengedepankan wawancara mendalam, observasi serta studi dokumen sebagai instrument penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik analisis data model atraktif dalam analisis. Sebagai instrumen evaluasi, peneliti menggunakan kerangka *Human-Organization-Technology(HOT)-Fit Model*. Hasil evaluasi menggunakan kerangka *HOT-Fit Model* berdasarkan komponen yang ada menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi PADE pada Kantor Desa Brengkok Kecamatan Brondong secara umum telah berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya.

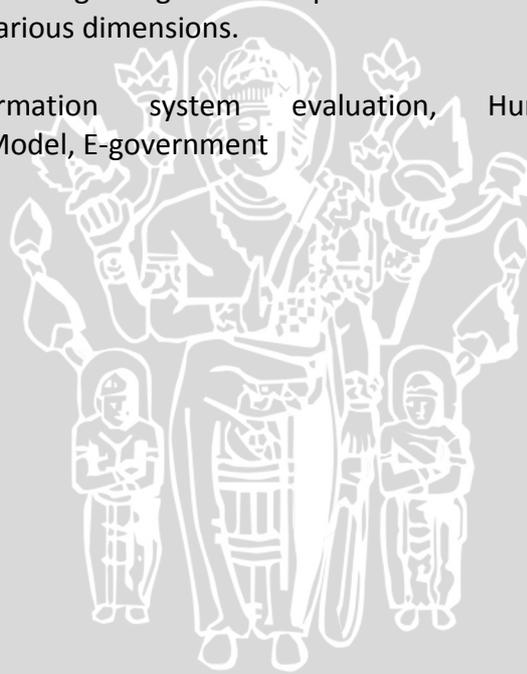
Kata kunci : Evaluasi sistem informasi, *Human-Organization-Technology(HOT)-Fit Model*, *E-government*.



## ABSTRACT

Pengelolaan Administrasi Desa Elektronik is a new innovation Government Lamongan in order to improve the quality of public sector service village. . The planning process began in 2008 and the experiment in 2013 with the vote 42 model village, one of which is Brengkok Brondong. Evaluation process was conducted to obtain will the adoption of pade have consistent with the objectives. Researchers apply research based descriptive using a qualitative approach. Prefer in-depth interviews, observation and study documents as instrument research. In addition, researchers also use data analysis techniques attractive models in the analysis. As the evaluation indicators, researchers are using the *framework* of Human-Organization-Technology (HOT)-Fit the Model. The evaluation results using the *framework* of HOT-Fit Model based on component indicates that the application of the PADE Information system at Brengkok, Brondong generally already going well according the goal and expectation. Although there are still have some missfit in various dimensions.

Keywords : information system evaluation, Human-Organization-Technology(HOT)-Fit Model, E-government



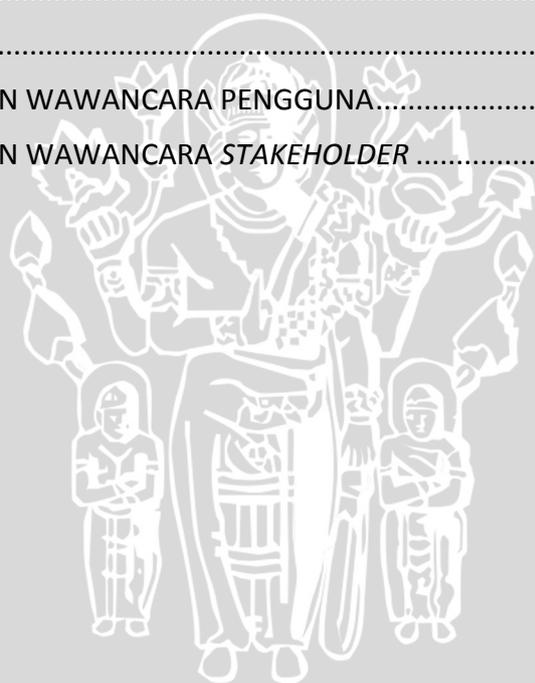
## DAFTAR ISI

PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	2
1.3 Tujuan .....	2
1.4 Manfaat.....	3
1.4.1 Manfaat Akademis .....	3
1.4.2 Manfaat Praktis .....	3
1.5 Batasan masalah .....	3
1.6 Sistematika pembahasan.....	3
<b>BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>5</b>
2.1 PENELITIAN HOT-Fit.....	5
2.2 SISTEM .....	6
2.3 INFORMASI.....	7
2.4 SISTEM INFORMASI.....	8
2.5 <i>E-GOVERNMENT</i> .....	9
2.5.1 Pengertian <i>E-Government</i> .....	9
2.5.2 Manfaat <i>E-Government</i> .....	10
2.5.3 Tipe Relasi <i>E-Government</i> .....	11
2.5.4 Elemen Penentu Keberhasilan <i>E-Government</i> .....	12
2.5.5 Jenis – Jenis Pelayanan <i>E-Government</i> .....	13

2.5.6 Perkembangan <i>E-Government</i> di Indonesia.....	13
2.5.7 Elemen Kesuksesan Manajemen Proyek E-Government .....	14
2.6 GAMBARAN UMUM KANTOR DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN .....	17
2.6.1 Lokasi Kantor Desa Brengkok .....	18
2.6.2 Visi Dan Misi Desa Brengkok .....	18
2.6.3 Struktur Organisasi Desa Brengkok.....	19
2.7 Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.....	20
2.7.1 Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) .....	20
2.7.2 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE).....	21
2.7.3 Fitur – Fitur Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE) ...	22
2.7.4 Desain Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) .....	23
2.8 <i>Human-Organization-Technology (HOT) Fit Model</i> .....	36
2.8.1 Proses Pengumpulan Data .....	38
2.8.2 Teknik Analisis Data.....	39
BAB 3 METODOLOGI .....	41
3.1 Alur Penelitian .....	41
3.2 Jenis Penelitian .....	42
3.2.1 Sumber Data.....	42
3.2.2 Metode Pengumpulan Data .....	42
3.2.3 Metode Penentuan Sampel.....	43
3.2.4 Instrumen Penelitian .....	43
BAB 4 evaluasi Pade menggunakan hot-fit model.....	45
4.1 <i>Technology</i> (Teknologi).....	45
4.1.1 Kualitas Sistem .....	45
4.1.2 Kualitas Informasi .....	47
4.1.3 Kualitas Layanan .....	47
4.2 <i>Human</i> (Manusia) .....	49
4.2.1 Penggunaan Sistem .....	49
4.2.2 Kepuasan Pengguna .....	52
4.3 <i>Organization</i> (Organisasi) .....	53

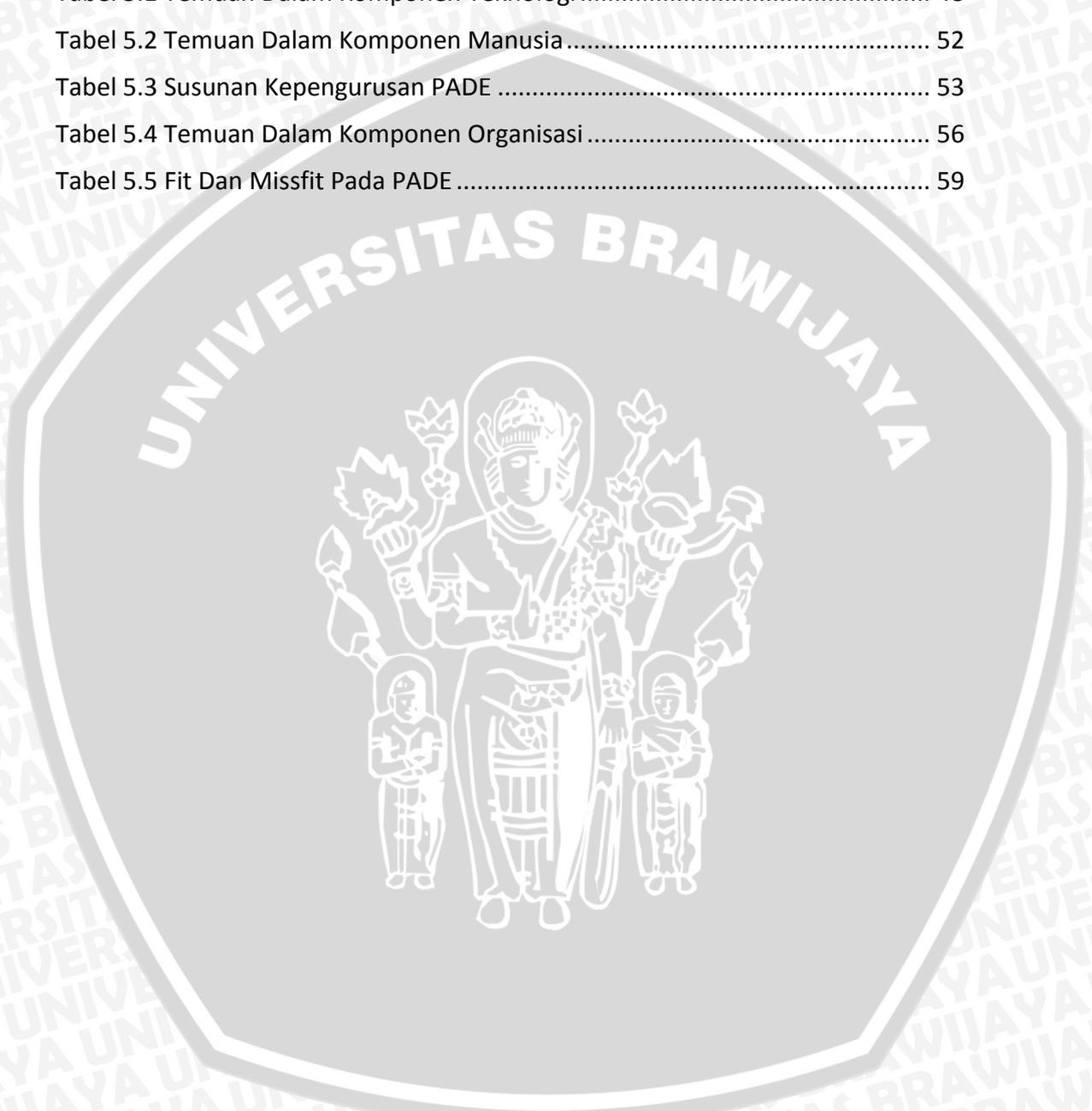


4.3.1 Struktur Organisasi .....	53
4.3.2 Lingkungan Organisasi.....	55
4.4 Net Benefit.....	56
4.4.1 <i>Fit Beetwen Human and Organization</i> (kesesuaian antara manusia dan organisasi) .....	57
4.4.2 <i>Fit Beetwen Human and Technology</i> (kesesuaian antara manusia dan teknologi).....	58
4.4.3 <i>Fit Beetwen Organization and Technology</i> (kesesuaian antara organisasi dan teknologi) .....	59
BAB 5 Kesimpulan dan saran.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA PENGGUNA.....	67
LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA STAKEHOLDER .....	69



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Desa Percontohan PADE .....	20
Tabel 5.1 Temuan Dalam Komponen Teknologi .....	48
Tabel 5.2 Temuan Dalam Komponen Manusia .....	52
Tabel 5.3 Susunan Kepengurusan PADE .....	53
Tabel 5.4 Temuan Dalam Komponen Organisasi .....	56
Tabel 5.5 Fit Dan Missfit Pada PADE .....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Desa Brengkok .....	17
Gambar 2.2 Logo Kantor Desa Brengkok .....	18
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kantor Desa Brengkok .....	19
Gambar 2.4 Form Login .....	23
Gambar 2.5 Menu Pengaturan .....	24
Gambar 2.6 Sub Menu Setting Desa .....	24
Gambar 2.7 Sub Menu Setting Dusun .....	25
Gambar 2.8 Sub Menu Setting Suku .....	25
Gambar 2.9 Sub Menu Setting Gelar Akademik .....	26
Gambar 2.10 Sub Menu Uraian Pekerjaan .....	26
Gambar 2.11 Sub Menu Biodata Penduduk .....	27
Gambar 2.12 Menu Pelayanan Administrasi .....	27
Gambar 2.13 Sub Menu Pengantar SKCK .....	28
Gambar 2.14 Menu Surat Keterangan Pindah .....	29
Gambar 2.15 Sub Menu Surat Kesaksian Kelahiran .....	29
Gambar 2.16 Sub Menu Surat Keterangan Kematian .....	30
Gambar 2.17 Sub Menu Surat Keterangan Tidak Mampu .....	31
Gambar 2.18 Sub Menu Surat Keterangan Domisili .....	31
Gambar 2.19 Sub Menu Surat Keterangan Kehilangan .....	32
Gambar 2.20 Sub Menu Surat Keterangan Usaha .....	32
Gambar 2.21 Sub Menu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah .....	33
Gambar 2.22 Menu Laporan Penduduk .....	33
Gambar 2.23 Sub Menu Laporan Data Penduduk .....	34
Gambar 2.24 Sub Menu Data Per KK .....	35
Gambar 2.25 Sub Menu Restore Data Kematian .....	35
Gambar 2.26 Sub Menu Restore Data Pindah .....	36
Gambar 2.27 <i>HOT-Fit Model Framework</i> .....	37
Gambar 3.1 Alur Penelitian .....	41
Gambar 5.1 Kesesuaian Antar Komponen .....	56
Gambar 5.2 Keterkaitan Antar Organisasi .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA PENGGUNA.....	67
LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA STAKHOLDER .....	69



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Dewasa ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) di dunia telah semakin luas. Perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, karena segala kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Termasuk pula di Indonesia, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan barang, jasa, atau pelayanan administratif.

Pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi oleh penyelenggara pelayanan publik memberikan kemudahan dalam pelayanan publik. Kemudahan tersebut meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian sebuah informasi dari penyelenggara kepada masyarakat begitu juga sebaliknya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam sebuah proses pemerintahan.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat serta pemanfaatannya yang begitu luas pemerintah mulai berlomba – lomba dalam melaksanakan proses transformasi menuju E-government . Pengembangan E-government diseluruh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 yang berisi tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Pengembangan E-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2013, sesuai Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/324/kep/413.013/2013 Pemerintah Kabupaten Lamongan memulai sebuah program Pengelolaan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE). PADE merupakan digitalisasi dari pendokumentasian seluruh data potensi desa baik berupa data administrasi pertanahan maupun kependudukan. Dalam tahap awal pengaplikasiannya Pemerintah Kabupaten Lamongan menunjuk 10 desa sebagai percontohan yaitu Desa Brengkok (Kecamatan Brondong), Latuan (Karanggeneng), Balon (Turi), Desa Dinoyo (Deket), Priyoso (Karangbinangun), Cangkring (Bluluk), Pule (Modo), Banyubang (Solokuro), Sukolilo (Sukodadi), dan Desa Sumengko (Kedungpring). Dan selanjutnya terdapat 472 desa dan kelurahan yang akan menerapkan program PADE tersebut.

Pengelolaan Administrasi Desa Elektronik atau PADE merupakan sebuah ide dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor bawah. Dengan adanya terobosan baru tersebut tentu Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyiapkan sarana dan fasilitas yang

diperlukan untuk penerapan sistem informasi PADE. Dalam upaya penerapannya, pemerintah dipertemukan oleh banyak kendala. Hal yang paling mendasar adalah kesiapan sumber daya manusia dalam menerima gebrakan dari penerapan PADE, desain tampilan PADE yang dirasa masih sulit dipahami, sampai kurangnya sarana prasana yang dimiliki oleh pihak kantor desa menjadi problematika yang belum kunjung selesai sehingga menghambat proses peningkatan kualitas pelayanan yang ada pada Kantor Desa Brengkok.

Terdapat banyak model evaluasi untuk sebuah pemerintahan elektronik. Namun, kali ini peneliti akan menggunakan HOT-Fit Model yang dirancang oleh Yusoff pada tahun 2006. HOT-Fit dikenal sebagai sebuah kerangka yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi sistem informasi. Hot-Fit model dipilih sebagai evaluasi karena menggunakan komponen-komponen yang penting dalam sistem informasi yakni manusia, organisasi, dan teknologi serta kesesuaian diantara ketiganya. Hal tersebut dirasa akan sangat membantu dalam proses peningkatan kualitas PADE serta kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik.

Peneliti memutuskan untuk menggunakan metode HOT-Fit Model pada penelitian kali ini karena model tersebut merupakan sebuah *framework* yang digunakan untuk mengevaluasi sistem informasi pelayanan (Yusoff et al : 2008). PADE merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk membantu kinerja Kantor Desa Brengkok, dalam memberikan pelayanan prima pada tugas dan kewajibannya sebagai sebuah instansi pemerintahan. HOT-Fit melakukan evaluasi dengan mencari kesesuaian antar komponen penting yaitu *Human – Organization – Technology*. *Human* dalam hal ini adalah para pengguna dari sistem PADE, yaitu bagaimana pengguna dapat menerima sebuah gebrakan dalam hal penggunaan sistem informasi seperti dan mencapai kepuasan sesuai tujuan awal. Selain itu bagaimana respon dan tanggapan dari organisasi dalam hal ini adalah para *stakeholder* dan penanggung jawab sistem dalam melakukan kontrol agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Tujuan dari Hot Fit model adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan oleh para *stakeholder* dalam mengambil sebuah kebijakan guna mewujudkan perbaikan dimasa depan.

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah :

Bagaimana Penerapan Sistem informasi E-government Pengelolaan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE) di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan berdasarkan kerangka HOT-FIT Model.

## 1.3 Tujuan

Tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis hasil evaluasi layanan Sistem informasi E-government yang diterapkan pada program Pengelolaan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE) di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan berdasarkan kerangka HOT-FIT Model

## 1.4 Manfaat

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat untuk para pembaca serta diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai dunia sistem informasi E-Government.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan pada institusi dalam hal ini adalah mengenai kinerja e-government sehingga dapat menunjang kegiatan pelayan publik yang lebih cepat dan efisien.

## 1.5 Batasan masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah hasil observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait di Kantor Kepala Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, serta masyarakat yang memanfaatkan layanan PADE tersebut.
2. Model analisis evaluasi yang digunakan adalah *Human – Organization – Technology (HOT)-Fit Model*.
3. Penelitian berfokus pada bagaimana pemanfaatan sistem informasi PADE pada desa tersebut

## 1.6 Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang dasar teori dan referensi yang melingkupi Sistem Informasi, *E-Government*, desain dan fitur PADE serta *Human – Organization – Technology (HOT) Fit model*.

### BAB III Metodologi

Membahas metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari studi literatur, pengumpulan data, serta penjelasan mengenai instrument penelitian yang nantinya akan digunakan sebagai acuan.

### BAB IV Evaluasi PADE Menggunakan HOT-Fit Model

Pada bagian ini merupakan pembahasan mengenai program PADE berdasarkan evaluasi yang dilakukan peneliti dengan menggunakan HOT-Fit Model sebagai acuan dalam melakukan evaluasi.

## BAB V Kesimpulan dan Saran

Berisikan tentang kesimpulan yang dapat diambil peneliti setelah melakukan langkah-langkah evaluasi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Pada bab ini peneliti juga memberikan saran-saran yang dirasa diperlukan untuk memaksimalkan penerapan PADE pada Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.



## BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN

### 2.1 PENELITIAN HOT-Fit

Sampai saat ini telah banyak penelitian mengenai evaluasi sistem informasi, guna mendapatkan hasil yang dapat membantu para pengembang dalam melakukan pengembangan sistem yang telah mereka gunakan. Sebuah sistem informasi pelayanan merupakan sesuatu yang akan sangat menjadi sorotan utama karena berhubungan secara langsung terhadap kepuasan pengguna. sehingga hasil dari sebuah evaluasi akan sangat diharapkan.

Pada perkembangannya banyak peneliti menggunakan HOT-Fit sebagai *framework* evaluasi sistem informasi. Beberapa hal yang akan tercapai dalam penggunaan HOT-Fit sangat menarik minat peneliti. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya studi kasus evaluasi sistem informasi yang menggunakan HOT-Fit Model. Dengan penggunaan komponen-komponen penting dalam sebuah sistem informasi meliputi manusia, organisasi dan teknologi membuat banyak peneliti tertarik menggunakannya, HOT-Fit model yang pada awalnya dikembangkan untuk sebuah sistem informasi kesehatan namun sebenarnya juga dapat digunakan untuk sistem informasi secara keseluruhan karena mengacu pada model sistem informasi yang ada sebelumnya. Kali ini peneliti mencoba menggunakan HOT-Fit Model dalam sistem informasi yang berbasis pelayanan publik. Karena komponen yang digunakan dalam HOT-Fit dapat mencakup kebutuhan dalam sistem pelayanan publik.

Pada penelitian kali ini peneliti mengacu pada beberapa referensi terutama beberapa jurnal dan skripsi mengenai evaluasi sistem informasi khususnya yang menggunakan HOT-Fit Model. Salah satunya adalah jurnal dari Maryati Mohd Yusof dan Azizatul Yusna Ahmed Yusuff yang berjudul *Evaluating E-Government System Effectiveness Using An Integrated Socio-Technical and Fit Approach*. Pada penelitian tersebut mereka membahas mengenai evaluasi terhadap sistem informasi *Project Monitoring System* (PMS) yang telah dikembangkan oleh Pemerintahan Malaysia. PMS adalah salah satu aplikasi pelopor dalam pelaksanaan *E-Government* di Negara Malaysia. Ini adalah sistem pemantauan pertama yang menghubungkan 25 kementerian pemerintah, departemen dan 700 lembaga *online*. PMS merupakan sebuah terobosan dengan menggunakan mekanisme baru dalam melaksanakan pengawasan sebuah proyek yang mencakup tiga aspek, yaitu aplikasi, data dan komunikasi untuk meningkatkan manajemen proyek efisiensi dan efektivitas. Hal ini juga menyediakan fasilitas repositori informasi untuk mendukung pembuatan laporan dan pengambilan keputusan. Pada langkah evaluasi yang dilakukan peneliti tersebut menggunakan HOT-Fit Model. Peneliti tersebut dalam membuktikan bahwa HOT-Fit juga dapat digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap seluruh aliran sistem informasi tidak hanya untuk sistem informasi kesehatan saja.

Dengan berdasarkan pada penelitian tersebut, diangkatlah penelitian kali ini dengan menggunakan metode evaluasi yang sama yakni menggunakan *framework* HOT-Fit Model, namun dengan evaluasi sistem yang berbeda. Peneliti akan melakukan evaluasi pada sistem informasi Program Administrasi Desa secara

Elektronik (PADE) dengan maksud yang serupa yakni membuktikan bahwa *framework* HOT-Fit Model merupakan model yang sangat umum sehingga dapat digunakan kepada seluruh jenis sistem informasi, ditambah hasil dari penelitian berikut diharapkan akan mampu memberikan masukan kepada seluruh pihak terkait karena program PADE berikut merupakan Program yang baru, sehingga masih berada dalam pengembangan dan masih memerlukan waktu untuk penyesuaiannya.

## 2.2 SISTEM

Terdapat beberapa pengertian sistem yang telah dikemukakan dari para ahli, diantaranya adalah :

Menurut Daranatha (2009), "Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai suatu tujuan yang sama".

Menurut McLeod JR (2001), Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen yang sama, tapi susunan dasar adalah : *Input*, *Transformasi*, *Output*, Mekanisme kontrol, Tujuan.

Krismiaji (2002) mengungkapkan bahwa sistem sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Sedangkan Mulyadi (1997) mendefinisikan bahwa sistem merupakan : a) Setiap sistem terdiri dari atas unsur-unsur; b) Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang terpadu sistem yang bersangkutan; c) Unsur-unsur tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem; d) Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

Menurut Jerry Fritz Gerald (Jogiyanto, 2003) "Suatu sistem adalah suatu jaringan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu". Sedangkan prosedur menurut Jogiyanto (2003) mengutip dari Richard F. Neuschel, didefinisikan bahwa "Suatu prosedur adalah urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakannya, Kapan (*when*) dikerjakan, dan bagaimana (*how*) mengerjakannya. Sedangkan pengertian prosedur menurut Zaki Baridwan (2000) adalah merupakan urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi.

Berdasarkan dari definisi-definisi dari sistem tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan serangkaian dari komponen yang dapat dikoordinasikan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu dengan tujuan dapat mempermudah bagi si pembuat dan pengguna suatu sistem tersebut. Dengan kata lain, sistem adalah sebuah hubungan yang bertujuan untuk mencapai sebuah sasaran tertentu.

Menurut Marshal Romney (2005) Sistem dikelompokkan menjadi dua jenis :

- a. Sistem Lingkaran Terbuka adalah sistem yang tidak mempunyai elemen mekanisme kontrol dan tujuan.
  - b. Sistem Lingkaran Tertutup adalah sistem yang disertai oleh adanya elemen mekanisme kontrol dan tujuan
- Sedangkan menurut Amir Jusuf (1996) sifat dari sistem terdiri dari empat kelompok, diantaranya yaitu :
- a. Sistem terbuka adalah sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumberdaya.
  - b. Sistem tertutup adalah sistem yang sama sekali tidak berhubungan dengan lingkungannya.
  - c. Sistem fisik adalah sistem yang terdiri dari sejumlah sumber fisik.
  - d. Sistem konseptual adalah sistem yang menggunakan sumberdaya konseptual (data dan informasi) untuk mewakili suatu sistem fisik.

### 2.3 INFORMASI

Berikut merupakan beberapa pengertian informasi dari para ahli, diantaranya yaitu :

Menurut Chusing seperti yang dikutip oleh Yuli Apriani (2004) data dapat terdiri dari sekumpulan karakter yang diterima sebagai input terhadap suatu sistem informasi dan disimpan serta diolah sedangkan informasi diartikan sebagai *output* pengolahan data yang diorganisir dan berguna bagi yang menerimanya. Sedangkan menurut Wilkinson (1995) mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sehingga data yang telah diproses sehingga bentuknya berubah dan nilainya semakin tinggi dan berguna untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hall (2001), informasi adalah data yang diproses dan pemakai melakukan suatu tindakan yang dapat ia lakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan menurut McLeod, Jr.(2001), informasi adalah data yang telah diproses, atau data yang memiliki arti.

Menurut Wahyono (2004) yang dikutip dari bukunya Gordon B.Davis, informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan.

Sebuah informasi dapat mengarahkan serta memperlancar suatu kegiatan sehari-hari. Sehingga sebuah informasi menjadi sangat penting di dalam sebuah organisasi. Suatu sistem yang kurang mendapatkan informasi akan menjadi kurang berguna karena tidak memiliki masukan-masukan dari data dan mengakibatkan kurang berfungsi dengan baik.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih memiliki guna dan arti bagi penerimanya yang dapat membantu menggambarkan suatu kejadian nyata (fakta) yang digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Atau juga dapat dikatakan bahwa informasi merupakan sebuah fakta yang memiliki arti dan guna dalam mencapai sebuah tujuan tertentu.

Menurut Romney (2001) agar informasi dapat memiliki manfaat bagi pemakainya, maka informasi harus memiliki kualitas atau karakteristik sebagai berikut :

a. Akurasi (*accuracy*)

Akurasi atau tingkat keakuratan dapat diartikan bahwa sejauh mana informasi dapat bebas dari kesalahan, tidak bias atau menyesatkan. Secara ideal semua informasi yang dihasilkan harus seakurat mungkin.

b. Ketepatan waktu (*Timelines*)

Seorang manajer secara ideal harus memperoleh informasi yang dapat menggambarkan apa yang akan terjadi dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang, serta informasi apa yang telah terjadi dimasa lampau, mengingat informasi sangat mempengaruhi proses pembuatan suatu keputusan.

c. Kelengkapan (*Completeness*)

Sebuah informasi dapat menjadi semakin berharga bila dapat memberikan suatu gambaran yang utuh dari permasalahan atau pemecahan masalah. Namun informasi juga dapat menjadi sesuatu yang sama sekali tidak menguntungkan apabila informasi tersebut terlaui berlebihan, justru dapat menjadi sebuah ancaman tersendiri, hal tersebut dapat terjadi kepada pengguna informasi (manajemen perusahaan) misalnya akan mengabaikan sebagian atau seluruh dari informasi yang ada.

d. Relevansi (*Relevance*)

Informasi yang ada harus dapat menambah pengetahuan atau nilai bagi para pembuat sutau keputusan, dengan cara mengurangi ketidak pastian, menaikkan kemampuan untuk memprediksi, atau menegaskan/ membenarkan ekspektasi semula.

e. Ringkas (*Simple*)

Informasi harus telah dikelompokan sehingga tidak perlu diterangkan.

f. Jelas (*Clear*)

Tingkat informasi harus dapat dimengerti dan dipahami oleh penerima.

g. Dapat dikuantifikasi (Kuantitatif)

Tingkat informasi dapat dinyatakan dalam bentuk angka.

h. Konsisten (*Consistency*)

Tingkat Informasi dapat diperbandingkan.

## 2.4 SISTEM INFORMASI

Menurut Hidayati (2007) menyatakan bahwa pengertian Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Laudon dan Laudon (2010) sistem informasi merupakan komponen yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis masalah dan visualisasi dalam sebuah organisasi.

Selain itu O'Brien dan Marakas (2008) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, *hardware, software*, jaringan komunikasi dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi.

Stair dan Reynolds (2010) mendefinisikan sistem informasi sebagai seperangkat elemen atau komponen yang saling terkait yang di kumpulkan (*input*), manipulasi (*process*), menyimpan, dan menyebarkan (*output*) data dan informasi dan memberikan reaksi korektif (*feedback*) untuk memenuhi tujuan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi komponen - komponen yang terdiri dari manusia, *hardware, software*, jaringan telekomunikasi dan data yang saling bekerjasama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan, pengendalian, analisis masalah dan visualisasi dalam organisasi.

## **2.5 E-GOVERNMENT**

### **2.5.1 Pengertian E-Government**

Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan serba efektif dan efisien, peran pemerintah dalam pelayanan publik era modern sekarang ini telah mengalami peningkatan.

Pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dikenal dengan istilah *E-Government*. Berbagai Negara dibelahan dunia telah banyak mengimplementasikan *E-Government* sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan bisnis, maupun pemerintah dengan masyarakat. Dengan penerapan *E-Government* maka akan membantu tercapainya efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dalam mendukung pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Clay G. Wescott mendefinisikan *E-Government* sebagai berikut :

*"E-Government is the use of Information and Communication Technology (ICT) to promote more efficiency and cost effective government, facilitate more convenient government services, allow greater public access to informations, and make government more accountable to citizens"*. Maksudnya adalah *E-Government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan efisiensi dan efektivitas biaya pemerintah, memfasilitasi pelayanan pemerintah yang lebih nyaman, memungkinkan akses publik, yang lebih besar terhadap informasi, dan membuat pemerintah lebih akuntabel kepada masyarakat (Indrajit, 2002).

Pengertian *E-Government* menurut Indrajit adalah :

- Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain antara lain yang berkepentingan (*stakeholders*),
- Melibatkan pengguna teknologi informasi (terutama internet),
- Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang sedang berjalan, (Indrajit, 2006).

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa arti dari *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik yang membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

### 2.5.2 Manfaat *E-Government*

Manfaat *E-Government* menurut Misuraca (2007) menyebutkan bahwa ada tiga dimensi dalam melihat manfaat dari penerapannya, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial dan pemerintahan.

#### a. Dimensi Sosial

Dalam hal sosial, manfaat *E-Government* cukup beragam mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan, penargetan yang lebih baik atas pelayanan pemerintah, peningkatan kapasitas dalam penyediaan keselamatan dan keamanan.

#### b. Dimensi Ekonomi

Dalam hal ekonomi, manfaat *E-Government* diantaranya yaitu mengurangi biaya transaksi untuk kapasitas yang lebih baik dengan target pelayanan, peningkatan cakupan dan kualitas penyampaian pelayanan, meningkatkan kapasitas respon dalam mengatasi isu-isu kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.

#### c. Dimensi Pemerintahan

Dalam hal pemerintahan, manfaat *E-Government* dapat meningkatkan tercapainya *Good Governance* dalam hal peningkatan keterbukaan, transparansi, akuntabel atau demokratis dibandingkan dengan pemerintahan yang konvensional. *E-Government* juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mengokohkan sistem demokrasi yang ada.

Manfaat pengembangan *E-Government* menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 adalah :

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan berbegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan sehari-hari.

- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada.
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

### 2.5.3 Tipe Relasi *E-Government*

Dalam tipe *E-Government* terdapat empat tipe relasi yang berhubungan langsung dengan pemerintah. Empat tipe relasi tersebut dalam Indrajit (2006) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) *Government to Citizens* (pemerintah ke masyarakat)

Pemerintah membangun dan menerapkan sebagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).

2) *Government to Bussiness* (pemerintah ke bisnis)

Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah *entity* berorientasi profit. Diperlukan relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis dalam menjalankan perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang lebih menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

3) *Government to Government* (pemerintah ke pemerintah )

Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal berbau diploma semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar Negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dengan budaya, dan lain sebagainya.

4) *Government to Employes* (pemerintah ke pegawai)

Aplikasi *E-Govermrnt* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Pada penelitian ini relasi yang akan digunakan adalah *relasi Government to Citizens* (Pemerintah ke masyarakat), dimana pemerintah Kabupaten Lamongan melalui sekretaris desa se Kabupaten Lamongan membangun dan menerapkan

program PADE dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).

#### 2.5.4 Elemen Penentu Keberhasilan *E-Government*

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard *JFK School of Government* dalam Indrajit (2006), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik ada 3 (tiga) indikator yang harus dilaksanakan :

##### a. *Support*

1. Disepakatinya kerangka *E-Government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam menghadapi visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlukan.
2. Dialokasikan sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi dan lain-lain) di setiap tatanan pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
3. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *E-Government*.
4. Disosialisasikannya konsep *E-Government* secara merata, *continue*, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum.

##### b. *Capacity*

*Capacity* adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *E-Government* menjadi kenyataan. Ada 3 (tiga) hal yang penting yang harus dimiliki oleh pemerintah terkait dengan elemen ini, yaitu :

1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci penerapan *E-Government*.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

##### c. *Value*

Pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *E-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan didasarkan oleh masyarakat

Penulisan lambang atau simbol sebaiknya menggunakan fasilitas simbol atau jenis huruf simbol yang ada pada program komputer pengolah kata untuk membedakannya dengan huruf biasa. Sebagai contoh untuk tanda perkalian tidak menggunakan huruf x tetapi “x” dari simbol. Untuk rumus matematika diusahakan ditulis dalam satu baris. Bila hal ini tidak memungkinkan maka harus diatur sedemikian rupa agar mudah dimengerti.

### 2.5.5 Jenis – Jenis Pelayanan *E-Government*

Menurut Indrajit (2006) salah satu cara mengkategorisasikan jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui *E-Government* adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama :

- a. Aspek Kompleksitas, yaitu menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *E-Government* yang ingin dibangun dan diterapkan;
- b. Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.

Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis pelayanan *E-Government* dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu :

#### a. *Publish*

Mengandung arti bahwa pembukaan situs web oleh organisasi pemerintah dalam sebatas digunakan sebagai sarana penyampaian informasi tentang kegiatan pemerintahan di luar media elektronik maupun non-elektronik yang selama ini ada.

#### b. *Interact*

Penggunaan teknologi internet yang memungkinkan kontak antara pemerintah dan masyarakat melalui situs web dapat dilakukan secara online sehingga memungkinkan interaksi yang lebih intensif dan terbuka

#### c. *Transact*

Penggunaan teknologi internet yang memungkinkan transaksi perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lain dalam lingkup pelayanan publik melalui situs web.

### 2.5.6 Perkembangan *E-Government* di Indonesia

Perkembangan *E-Government* pada suatu negara atau organisasi mengalami beberapa fase sebelum mencapai fase yang paling tinggi yaitu *Horizontal Integration*, yakni tercapainya suatu kondisi beberapa sistem layanan publik yang berjalan pada fungsi yang berbeda-beda namun terintegrasi dengan baik sehingga terbangun sebuah *one stop service*. Pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 membagi menjadi 4 tingkatan sistem informasi berdasarkan dari sifat transaksi informasi dan pelayanan publik dengan jaringan informasi serta pengembangan *E-Government*, yaitu :

#### 1. Tingkat 1 - Persiapan

Pada tingkatan pertama merupakan sebuah persiapan yang harus dilakukan sebagai langkah dasar atau modal yang perlu dilakukan untuk sebuah pengembangan e-government. Pada tingkatan ini berisi tentang :

1. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga.
2. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana *Multipurpose Community Center*, Warnet, *SME-Center*, dl.
4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk public.

## 2. Tingkat 2 - Pematangan

Pada tingkatan kedua merupakan langkah pematangan dari persiapan yang telah dilakukan pada tingkat pertama, pada langkah berikut berisi tentang :

1. Pembuatan situs informasi publik interaktif.
2. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

## 3. Tingkat 3 - Pemantapan

Tingkat 3 atau pemantapan, tingkatan ini *E-Government* yang disiapkan telah masuk kepada pelayanan-pelayanan transaksional dengan pihak luar, baik itu masyarakat, maupun dengan instansi ataupun lembaga lain.

1. Pembuatan situs transaksi pelayanan public.
2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

## 4. Tingkat 4 - Pemanfaatan

Pada tingkatan terakhir yaitu pemanfaatan, setiap sistem informasi *E-Government* yang telah disiapkan pada tingkatan-tingkatan sebelumnya akan siap untuk dijalankan dengan fungsi dan target yang lebih luas, dengan adanya tingkatan-tingkatan yang ada sebelumnya membuat sistem informasi yang telah disiapkan akan dikembangkan menurut potensi yang ada.

1. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.
2. Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat – 4.

Pengembangan *E-Government* yang dilakukan pemerintah merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja melalui pengoptimalisasian pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktifitas yang berkaitan yaitu :

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

### 2.5.7 Elemen Kesuksesan Manajemen Proyek E-Government

University of Maryland mengadakan riset khusus di bidang E-Government yang bertujuan untuk mencari tahu elemen-elemen apa saja yang menjadi kunci keberhasilan dari sebuah proyek E-Government. Berdasarkan studi tersebut kemudian dirumuskan delapan elemen sukses dalam melakukan proyek *E-Government* menurut Indrajit (2002). Masing-masing elemen tersebut diuraikan antara lain :

#### a. *Political Environment*

*Political environment* adalah keadaan atau suasana dimana politik proyek yang bersangkutan berada atau dilaksanakan. Berkaitan dengan political environment, terdapat dua tipe proyek yaitu *Top Down Projects* (TDP) dan *Bottom Up Projects* (BUP).

Menurut Indrajit (2002), TDP berkaitan dengan eksistensi sebuah proyek yang ditentukan oleh adanya inisiatif dari lingkungan eksekutif (misalnya presiden atau perdana menteri) sebagai otoritas legislatif (lembaga perwakilan rakyat) sebagai pemberi mandate. BUP dilaksanakan karena adanya ide atau inisiatif dari kepala unit atau karyawan (birokrat) yang berada di salah satu lembaga pemerintahan atau departemen.

Berdasarkan definisi Indrajit tentang *political environment* tersebut, tahap selanjutnya adalah menguraikan tentang aspek – aspek penting dalam TDP maupun BUP. TDP mempunyai dua aspek penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah agar proyek *E-Government* yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Pertama, melakukan kampanye (*marketing*) terhadap keinginan pembangunan *E-Government* kepada seluruh anggota masyarakat dengan pertimbangan sebuah pemerintahan yang efisien. Kedua, meletakkan proyek ini sebagai salah satu prioritas tertinggi dalam penyelenggaraan pembangunan negara.

BUP juga mempunyai aspek penting yang harus diperhatikan demi keberhasilan sebuah proyek. Pertama, ukuran atau skala proyek yang ada lebih baik kecil, sehingga mudah mendapatkan sponsor dari kalangan internal dimana kepala unit atau karyawan tersebut berada (karena dinilai tidak membutuhkan berbagai sumber daya yang besar yang dapat menyerap energy dari lembaga atau instansi pemerintah terkait). Kedua, produk atau jasa yang diinginkan haruslah jelas, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat mengetahui hasil apa yang diinginkan sebagai keluaran proyek *E-Government* yang bersangkutan. Ketiga, adanya manfaat yang segera didapatkan secara signifikan oleh para pengguna (*end users*) dari proyek *E-Government* yang dilaksanakan.

b. *Leadership*

Faktor kepemimpinan sangat mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Menurut Indrajit (2002), factor kepemimpinan biasanya menempel pada mereka yang bertugas sebagai pemimpin dari penyelenggaraan proyek, yaitu para manajer proyek (*projek manager*). Manajer proyek memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebuah proyek dari awal hingga akhir sesuai dengan siklus proyek (*project life cycle*) yang dijalankan.

c. *Planning*

Perencanaan merupakan tahapan awal sebelum suatu kebijakan di implementasikan. Perencanaan dilakukan untuk memproyeksikan hasil yang ingin dicapai, indrajit (2002) menguraikan sebagai berikut :

“Sesuai dengan siklus manajemen proyek, perencanaan merupakan sebuah tahap yang sangat penting. Perencanaan merupakan tahap awal dimana gambaran menyeluruh dan detail dari rencana inisiatif *E-Government*

diproyeksikan. Perencanaannya yang baik akan memiliki secara keseluruhan, karena apa yang dilaksanakan pada siklus berikutnya sebenarnya adalah pengejawantahan dari rencana besar yang telah disepakati (*baseline planning*). “

d. *Stakeholders*

*Stakeholders* merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau proyek dan untuk lebih memahami siapa saja *stakeholders* dalam proyek *E-Government*, akan diuraikan oleh Indrajit sebagai berikut :

Menurut Indrajit (2002), *stakeholders* adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan (langsung maupun tidak langsung) terhadap penyelenggaraan proyek *E-Government* antara lain : Pemerintah (lembaga terkait dengan seluruh perangkat manajemen dan karyawannya), sektor swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan lain sebagainya.

e. *Transparency / Visibility*

Penerapan *E-Government* tentunya diharapkan dapat mewujudkan adanya transparansi dalam setiap prosesnya. Indrajit (2002) menjelaskan transparansi sebuah proyek *E-Government* sangat erat kaitannya dengan keberadaan *stakeholders*, dalam arti kata adalah bahwa harus selalu tersedia seluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang berlangsung untuk dapat secara bebas diakses *stakeholders* yang beragam tersebut.

Tersedianya informasi semacam status proyek, alokasi sumber daya, evaluasi bertahap proyek dan lain sebagainya bertujuan untuk menciptakan kredibilitas dan legitimasi yang baik bagi para penyelenggara proyek maupun *stakeholders* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan mengakses data dan informasi terkait dengan proyek yang sedang berlangsung secara tidak langsung merupakan sarana prasarana yang efektif, karena terlihat keseriusan pemerintah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya melalui implementasi kebijakan atau proyek *E-Government*.

f. *Budgets*

Berdasarkan kenyataan yang ada, besarnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah sangat bergantung pada tingkat prioritas yang diberikan oleh pemerintah terhadap status proyek terkait. (Indrajit,2002)

Indrajit (2002) juga menjelaskan bahwa kekuatan sumberdaya *financial* yang di anggarkan pada sebuah proyek *E-Government* merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan berhasil tidaknya pada pelaksanaan sebuah proyek.

g. *Technology/ visibility*

*Spectrum* teknologi informasi yang dipergunakan di dalam proyek *E-Government* sangatlah lebar, dari yang paling sederhana dan murah sampai dengan yang paling canggih (*state of the art*). Sumberdaya manusia (SDM) juga mempengaruhi perkembangan teknologi yang digunakan, semakin tinggi kualitas SDM maka semakin canggih pula teknologi yang mampu berkembang.

Menurut Indrajit (2002), pilihan teknologi yang akan diimplementasikan di dalam proyek *E-Government* sangat tergantung pada anggaran yang tersedia. Semakin besar anggaran yang ada, semakin canggih teknologi yang dapat dipilih dan dipergunakan, sehingga akan meningkatkan probabilitas berhasilnya suatu proyek (dalam arti kata tercapainya manfaat yang ditargetkan). Teknologi juga berperan penting terhadap kualitas layanan publik, semakin canggih teknologi yang digunakan, masyarakat juga semakin mudah dalam mengakses bentuk-bentuk layanan publik secara online.

Hal tersebut merupakan suatu kenyataan bahwa pilihan teknologi yang akan diimplementasikan di dalam sebuah proyek *E-Government* sangat tergantung dengan anggaran yang tersedia. Semakin besar anggaran yang ada, semakin canggih pula teknologi yang dapat dipilih dan dipergunakan sehingga dapat meningkatkan keberhasilan suatu proyek.

h. *Innovation*

Elemen yang turut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan suatu proyek *E-Government* adalah kemampuan SDM untuk melakukan inovasi-inovasi tertentu. Menurut Indrajit (2002), inovasi dalam *E-Government* tidak terbatas pada kemampuan menciptakan produk-produk baru tertentu, tetapi mereka yang terlibat dalam proyek harus memiliki tingkat kreatifitas yang cukup, terutama dalam melakukan pengelolaan terhadap proyek *E-Government* yang ada, sehingga berbagai hambatan yang kerap ditemui dalam sebuah proyek dengan mudah dihilangkan.

## 2.6 GAMBARAN UMUM KANTOR DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN



**Gambar 2.1 Peta Desa Brengkok**  
**Sumber : Kantor Desa Brengkok (2016)**

Desa Brengkok merupakan salah satu desa yang terdapat pada kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Memiliki luas daerah 1.056,075 Ha dengan

kondisi ketinggian tanah dari permukaan laut sebesar 63 m, Desa Brengkok dibatasi oleh beberapa desa, yaitu :

- 1). Sebelah Utara : Desa Labuhan
- 2). Sebelah Selatan : Desa Tlogoretno
- 3). Sebelah Barat : Desa Sidomukti
- 4). Sebelah Timur : Desa Sedayulawas

Sampai tahun 2016 ada sebanyak 13.679 jiwa yang tercatat menjadi penduduk di Desa Brengkok tersebut. Jumlah tersebut meliputi 6.186 jiwa penduduk laki-laki dan 7.293 jiwa penduduk perempuan, dengan berbagai tingkat pekerjaan dan pendidikan.

### 2.6.1 Lokasi Kantor Desa Brengkok

Kantor Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berada tepat ditengah-tengah Desa Brengkok. Tepatnya berada di jalan



**Gambar 2.2 Logo Kantor Desa Brengkok**  
Sumber : Kantor Desa Brengkok (2016)

### 2.6.2 Visi Dan Misi Desa Brengkok

#### Visi

Perubahan lingkungan strategis yang demikian pesat dengan sendirinya telah menciptakan berbagai tantangan yang harus dihadapi dengan sigap oleh aparatur Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Dalam rangka menunjang dan memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mencanangkan visi yaitu :

*Mewujudkan Desa Brengkok Asri dan Bermoral*

Dalam mewujudkan Visi tersebut, Kantor Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan senantiasa terus berbenah dan meningkatkan kemampuan, baik sumber daya aparatur Desa maupun kelembagaan. Secara visioner untuk mencapai hasil optimal bagi organisasi, maka visi menjadi tuntutan yang bermakna untuk menggambarkan kondisi yang akan datang dalam membawa organisasi kearah perubahan yang dikehendaki sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakatnya.

## Misi

Implementasi visi sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan tantangan yang harus diwujudkan secara nyata dalam bentuk tindakan oleh seluruh aparatur Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

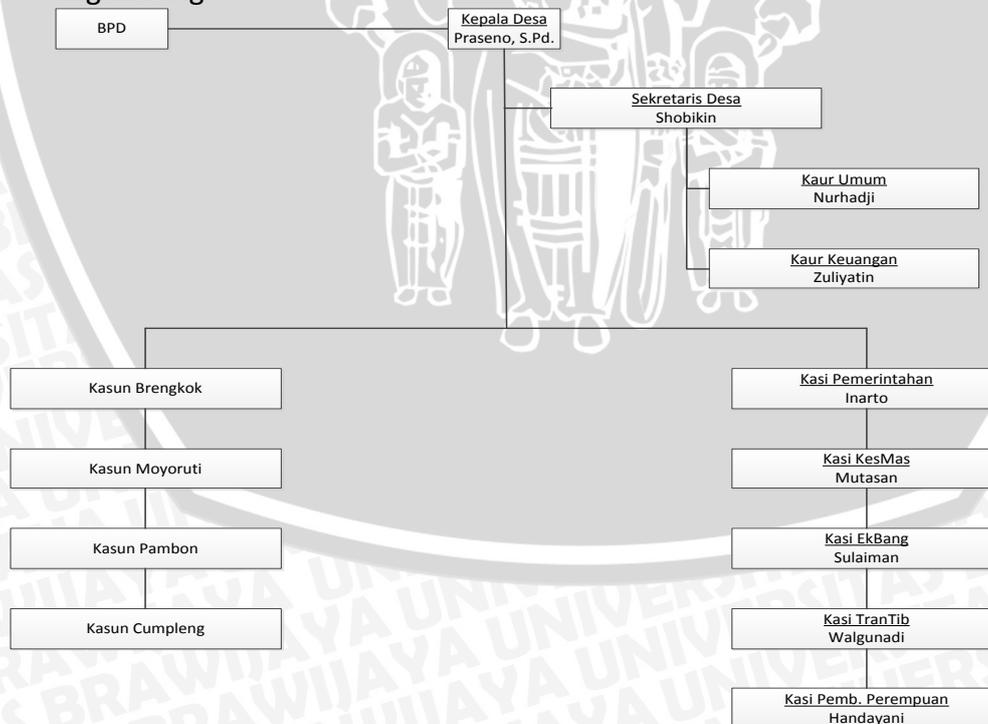
Sebagai wujud nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Adapun misi dari Kantor Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kerjasama keamanan antara Limnas, RT/RW dan warga;
- Meningkatkan perekonomian warga melalui : SPP, KOPWAN, KOPLIK Rajungan dan Gapoktan.;
- Meningkatkan kerapian lingkungan melalui tata ruang desa;
- Menata keindahan desa dengan cara membangun gapuranisasi, tamanisasi dan penerangan jalan;
- Meningkatkan pembinaan moral melalui majlis-majlis ta'lim.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan ataupun tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya lingkungan yang asri dan bermoral. Misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan membangun fasilitas publik seperti gapura, taman dan penerangan jalan.

### 2.6.3 Struktur Organisasi Desa Brengkok

Struktur organisasi dimaksudkan untuk mempermudah pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada setiap organisasi. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kekacauan dan ketimpangan dalam menjalankan tugas masing-masing.



**Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kantor Desa Brengkok**  
Sumber : Kantor Desa Brengkok (2016)

## 2.7 Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

### 2.7.1 Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE)

Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk mempermudah pemerintahan desa dalam mengolah data administrasi, kependudukan, pertanahan, keuangan, potensi desa serta pengolahan surat menyurat. Pemanfaatan teknologi informasi dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengolahan informasi.

Program Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) disahkan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik di Kabupaten Lamongan, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/322/kep/413.013/2013 tentang tim pelaksanaan program Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik di Kabupaten Lamongan, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/324/Kep/413.013/2013 tentang penunjukan desa percontohan pelaksanaan Program Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik di Kabupaten Lamongan.

Sesuai dengan lampiran Bupati Lamongan Nomor 188/324/Kep/413.013/2013 Tanggal 15 Februari 2013 dalam tahap awal penerapan sistem terdapat 42 desa yang akan dijadikan sebagai desa percontohan. Namun untuk selanjutnya sistem berikut juga akan diperuntukkan untuk 472 desa yang ada di Kabupaten Lamongan. Berikut merupakan daftar desa percontohan :

**Tabel 2.1 Daftar Desa Percontohan PADE**

1. Desa Kemantren	22. Desa Karangkembang
2. Desa Dinoyo	23. Desa Truni
3. Desa Balun	24. Desa Sumengko
4. Desa Putatkumpul	25. Desa Kandanrejo
5. Desa Badurame	26. Desa Supenuh
6. Desa Geger	27. Desa Pule
7. Desa Tambakrigadung	28. Desa Lamongrejo
8. Desa Made	29. Desa Cerme
9. Desa Sukosongo	30. Desa Gempolmanis
10. Desa Canggih	31. Desa Nogojatisari
11. Desa Sukolilo	32. Desa Cangkring
12. Desa Sumberaji	33. Desa Sukobendo
13. Desa Sidogembul	34. Desa Kedungsoko
14. Desa Brengkok	35. Desa Sewor
15. Desa Padanganploso	36. Desa Kedungkumpul
16. Desa Plososetro	37. Desa Priyoso
17. Desa Gempolpading	38. Desa Glagah
18. Desa Sekaran	39. Desa Tejoasri
19. Desa Miru	40. Desa Brengkok
20. Desa Latukan	41. Desa Banyubang

Sumber : Lampiran Bupati Lamongan (2013)

Seluruh desa percontohan yaitu sebanyak 42 desa diberikan satu set komputer yang telah di install aplikasi PADE didalamnya. Aplikasi tersebut memuat data kependudukan, keuangan, surat menyurat, pertanahan, serta potensi desa.

Salah satu desa yang masuk kedalam desa percontohan adalah Desa Brengkok, Kecamatan Brondong. Desa Brengkok merupakan salah satu dari 42 desa yang diberikan kesempatan untuk menggunakan Program Administrasi Desa secara Online pada tahap awal.

Desa Brengkok merupakan salah satu desa yang berada pada disekitar pantai utara jawa. Desa dengan potensi pertanian yang sangat diunggulkan dengan luas daerah mencapai 1.057,10 Ha dan 2.819 perumahan penduduk sehingga lahan yang ada sangat dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan jumlah penduduk mencapai 10.079 Desa Brengkok menjadi desa dengan penduduk terbanyak nomer 3 setelah Desa Brondong, dan Desa Sedayulawas. Desa Brengkok meliputi tiga desa yang tergabung dengan Desa Brengkok, yaitu Pambon di sebelah tenggara, Cumpleng di sebelah timur laut dan Moyoruti di sebelah barat. Dengan kondisi yang tergambar diatas, peneliti ingin melakukan analisa apakah potensi tersebut berpengaruh terhadap penerapan sistem Program Administrasi Desa secara Elektronik (PADE).

Penerapan sistem PADE di Desa Brengkok telah cukup lama, terhitung sejak tahun 2013 PADE telah menjadi sistem penting yang sangat mempengaruhi kinerja desa tersebut. Sebagai sistem baru PADE mengalami banyak pembaharuan, pembaruan tersebut guna memperbaiki bug-bug yang ada pada sistem serta penambahan fitur yang dapat membantu kinerja dari desa. Beberapa fitur yang ditambahkan pada sistem PADE ketika pembaharuan sistem yaitu menu surat keterangan usaha, dan surat kepemilikan tanah.

### **2.7.2 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE)**

Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) merupakan sebuah gagasan yang bermaksud untuk meningkatkan pelayanan publik disektor pemerintahan desa, mengolah data administrasi kependudukan, keuangan, pertanahan, dan potensi desa serta pengolahan administrasi surat menyurat merupakan fitur utama pada aplikasi PADE berikut. Diharapkan dengan adanya aplikasi berikut pelayanan yang terjadi di setiap desa jauh lebih efektif, efisien, dan akurat, serta lebih dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) memiliki tiga poin penting dalam penerapannya, yaitu :

1. Peningkatan pengolahan administrasi desa secara cepat dan akurat;
2. Peningkatan pelayanan masyarakat;
3. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan teknologi informasi (TI).

Sedangkan sasaran dari penerapan aplikasi Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) berikut adalah Seluruh desa yang ada di Kabupaten Lamongan.

### 2.7.3 Fitur – Fitur Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE)

PADE merupakan hasil dari gagasan Pemerintah Daerah Lamongan dalam proses mengembangkan sebuah kota digital yang saling memiliki keterkaitan antar desa dengan pemerintah pusat dengan tujuan untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat lamongan.

Sesuai dengan namanya PADE merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan data administratif desa pada kabupaten lamongan. Fitur –fitur yang ada dalam PADE meliputi :

#### 1. Pengaturan

Menu pengaturan merupakan menu yang berisikan tentang profil desa secara keseluruhan, Mulai dari daftar dusun yang masuk kedalam desa, daftar suku yang terdapat pada desa, daftar gelar serta uraian pekerjaan dari masyarakat desa tersebut.

#### 2. Data Induk

Pencatatan data induk merupakan tugas utama dari kantor desa. Sehingga fitur berikut merupakan fitur utama yang dapat digunakan sehari-hari, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam menu berikut *user* dapat menambahkan data masyarakat sesuai dengan data yang sebenarnya.

#### 3. Pelayanan Administrasi

Fitur ini juga merupakan pengembangan dari proses pencatatan yang biasanya dilakukan secara manual. Fitur ini juga tidak kalah penting dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menu pelayanan administrasi meliputi pembuatan SKCK, pembuatan surat keterangan pindah, surat kesaksian kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan domisili, surat keterangan kehilangan, surat keterangan usaha, surat keterangan kepemilikan tanah.

#### 4. Laporan Penduduk

Pada menu laporan penduduk terdapat dua sub menu, yaitu

Laporan data penduduk, Laporan data kependudukan digunakan untuk merekap data pekerjaan penduduk dari suatu desa. Dengan harapan user dapat dengan cepat mengetahui potensi-potensi apa saja yang terdapat dalam desa tersebut.

Data per KK, diharapkan pengguna dapat dengan mudah mencari daftar keluarga yang terdapat pada masing-masing desa tersebut.

#### 5. Restore data

Merupakan fitur back up yang disediakan oleh sistem, hal tersebut dapat mengurangi resiko hilangnya data yang tersimpan pada PADE.

## 2.7.4 Desain Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE)

### 1. Form Login

Pada tahap awal setelah membuka aplikasi PADE sistem akan langsung menampilkan form login,



**Gambar 2.4 Form Login**

Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

Pada tahap ini pengguna diharuskan memasukkan *username* dan *password*, yang telah dimiliki sebelumnya. Pada tahap ini tidak disediakan fitur *sign up*, sehingga sistem tidak dapat membuat *username* baru, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan data mengingat data yang ada adalah data yang penting bagi desa.

Setelah *username* dan *password* berhasil dimasukkan pengguna akan masuk pada beranda aplikasi yang menyediakan beberapa menu yaitu pengaturan, data induk, pelayanan administrasi, laporan penduduk, restore data dan keluar, yang juga terdapat beberapa sub menu pada beberapa menu yang ada.

### 2. Menu Pengaturan

Menu pengaturan berisi tentang profil desa, terdapat penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan langsung dengan desa. Seperti gambar 2.5 dibawah.



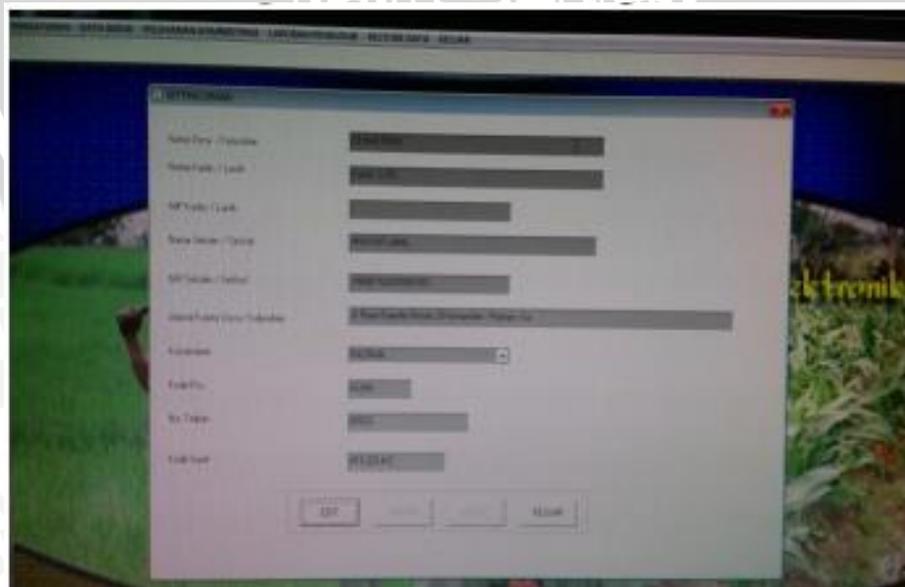
**Gambar 2.5 Menu Pengaturan**  
**Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok**

Dalam menu pengaturan terdapat beberapa sub menu, yaitu setting desa, setting dusun, setting suku, setting gelar akademik, setting uraian pekerjaan. Pengguna hanya perlu memasukkan data kedalam form yang telah di sediakan dan data akan segera tersimpan.

a. Setting Desa

Merupakan sub menu yang berisi tentang profil desa yang dapat disesuaikan sendiri oleh pengguna, yang berada pada menu Pengaturan.

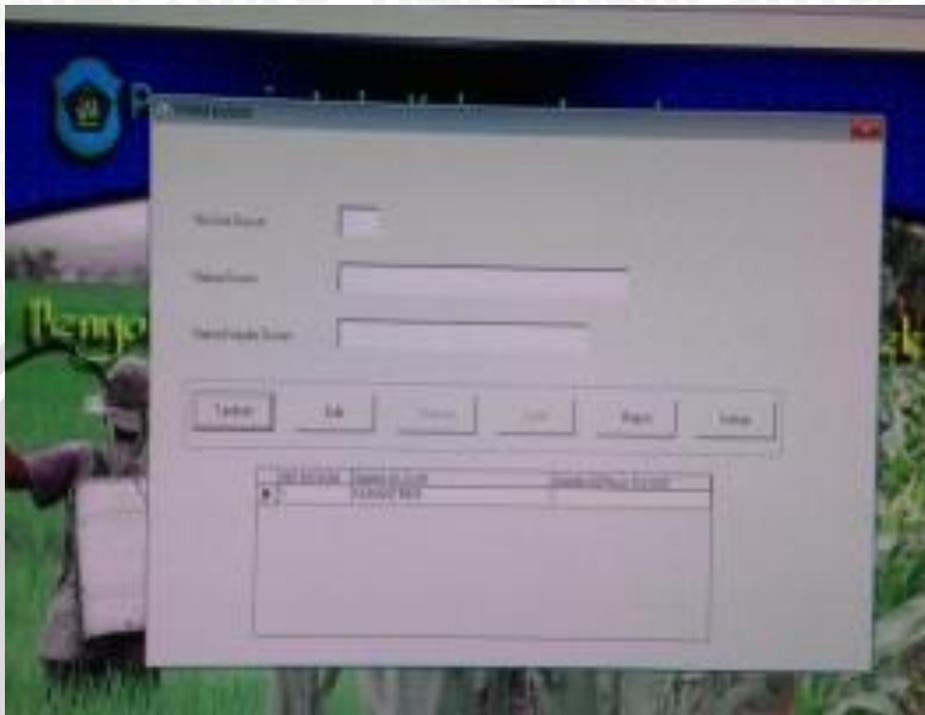
Seperti yang terlihat pada gambar 2.6 sub menu Setting desa terdapat beberapa kolom yang perlu diisi oleh pengguna, yaitu nama Desa / Kelurahan, nama Kades/ Lurah, NIP Kades/Lurah, nama sekdes/ sekkel, NIP sekdes/ sekkel, alamat Kantor Desa/ Kelurahan, Kecamatan, kode pos, No.telp, kode surat. Setelah seluruh kolom berhasil diisi maka aplikasi PADE siap digunakan.



**Gambar 2.6 Sub Menu Setting Desa**  
**Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok**

b. Setting Dusun

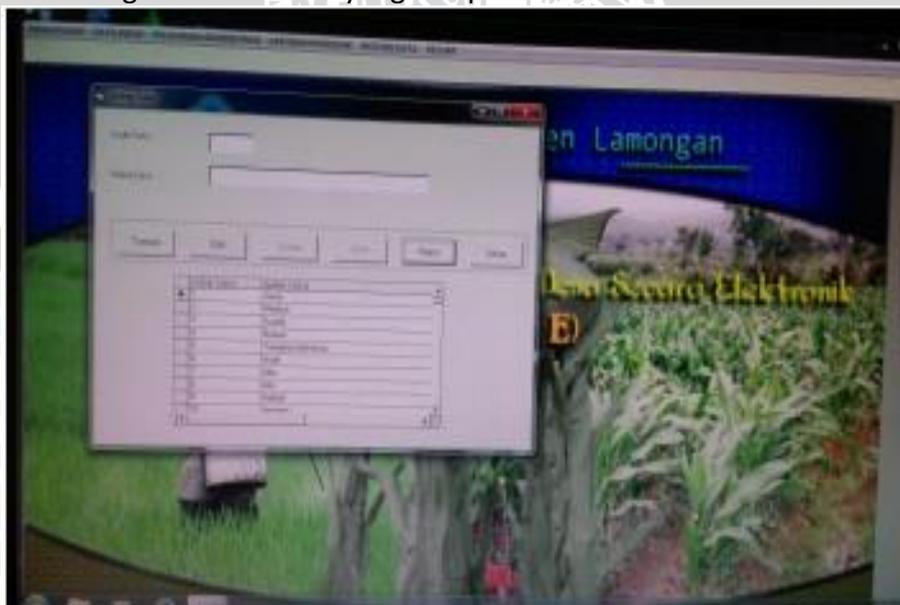
Setting Dusun memiliki berisi tentang informasi dusun, informasi yang perlu dimasukkan adalah seperti nomor urut Dusun, nama Dusun, nama Kepala Dusun, setelah seluruh kolom terisi pilih *button* tambah untuk menambahkan informasi tersebut.



**Gambar 2.7 Sub Menu Setting Dusun**  
 Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

c. Setting Suku

Berisi tentang informasi suku yang ada pada desa tersebut.

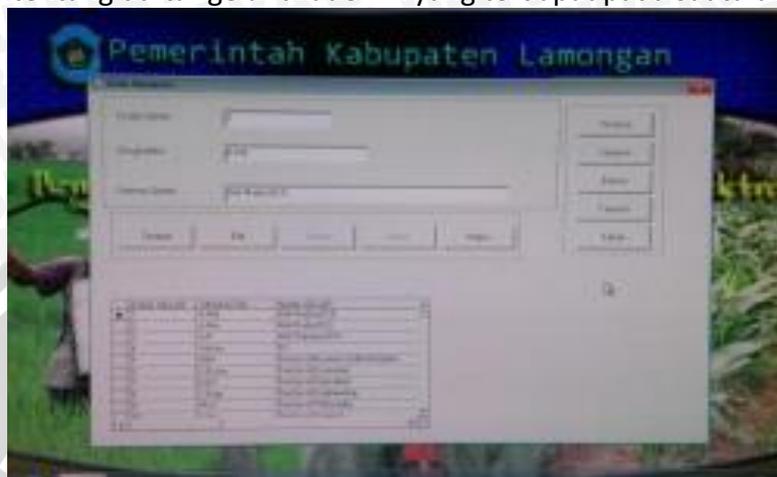


**Gambar 2.8 Sub Menu Setting Suku**  
 Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

Untuk menambahkan daftar suku baru seperti pada gambar 2.8, pengguna perlu mengisi *form* yang ada dengan mengisi kolom nomer kode suku dan nama suku, setelah itu pilih *button* Tambah untuk menyimpan data suku.

d. Setting Gelar Akademik

Berisi tentang daftar gelar akademik yang terdapat pada suatu desa.



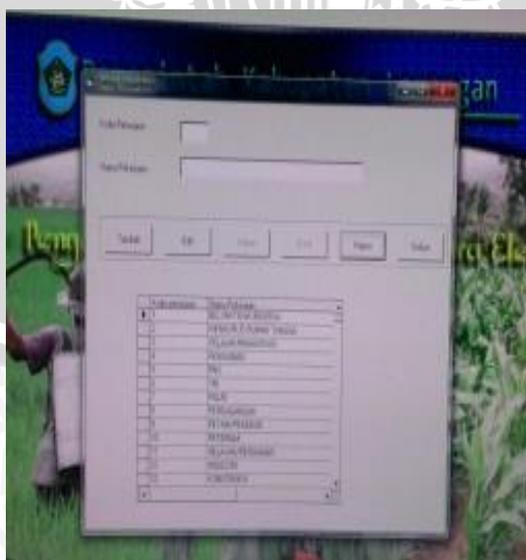
**Gambar 2.9 Sub Menu Setting Gelar Akademik**

Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

Untuk menambahkan daftar gelar akademik pengguna hanya perlu mengisi kode gelar dan singkatan nama gelar.

e. Setting Uraian Pekerjaan

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.10, tampilan setting uraian pekerjaan terdapat kolom yang harus di isi yaitu kode pekerjaan dan nama pekerjaan. Setelah mengisi kolom tersebut klik tambah untuk menambahkan. Pilihan kode dan nama pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah yang telah disediakan.



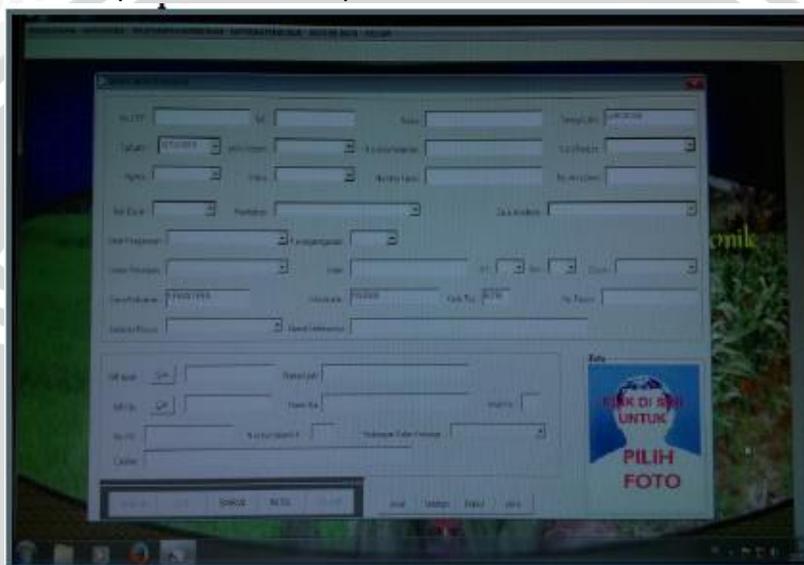
**Gambar 2.10 Sub Menu Uraian Pekerjaan**

Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

2. Data Induk

Menu data penduduk merupakan menu yang berisi tentang data suatu penduduk. Didalam menu data induk terdapat sub menu biodata penduduk, yang berfungsi untuk pencatatan elektronik tentang penduduk berdasarkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang telah dimiliki sebelumnya.

Gambar 2.11 merupakan form yang terdapat pada sub menu biodata penduduk yang harus diisi terlebih dahulu, untuk melakukan penyimpanan data baru pengguna diharuskan mengisi setiap *fill* yang ada dengan data yang sesuai dengan Kartu Keluarga (KK). Data tersebut selanjutnya akan diolah sebagai rekap data kependudukan desa, selain itu data tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan sensus penduduk disaat pemilihan umum.



**Gambar 2.11 Sub Menu Biodata Penduduk**  
**Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok**

3. Pelayanan Administrasi

Pada menu ketiga yang ada pada sistem aplikasi PADE merupakan menu yang berisikan tentang kegiatan surat menyurat yang perlu dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, terdapat beberapa sub menu yang melengkapi menu tersebut.

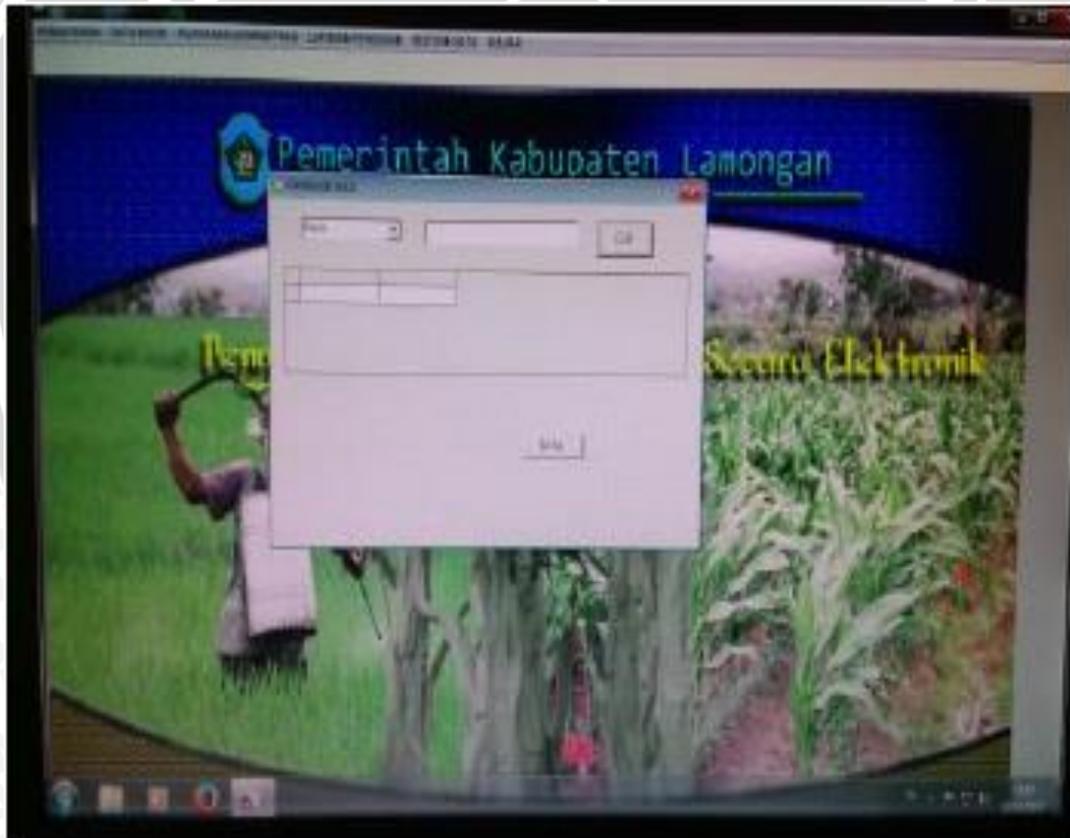


**Gambar 2.12 Menu Pelayanan Administrasi**  
**Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok**

Gambar 2.12 merupakan tampilan menu pelayanan administrasi, terdapat beberapa sub menu seperti pengantar SKCK, surat keterangan pindah, surat kesaksian kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan domisili, surat keterangan kehilangan, surat keterangan usaha, surat keterangan kepemilikan tanah.

a. Pengantar SKCK

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau biasa disebut dengan SKCK merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan catatan kriminal seseorang, surat keterangan itu didapat dengan syarat-syarat yang perlu dibawa, salah satunya adalah surat pengantar yang dikeluarkan oleh kelurahan atau Kantor Kepala Desa setempat. Untuk menggunakan sub menu Pengantar SKCK, pengguna perlu memasukkan nama pemohon kedalam 2 buah *fill* yang terdapat di form tersebut, kemudian pilih *button* cari, selanjutnya jika pencarian berhasil maka seluruh nama yang memiliki kesamaan dengan nama pemohon akan ditampilkan, pengguna bisa memilih dan langsung memproses permohonan.



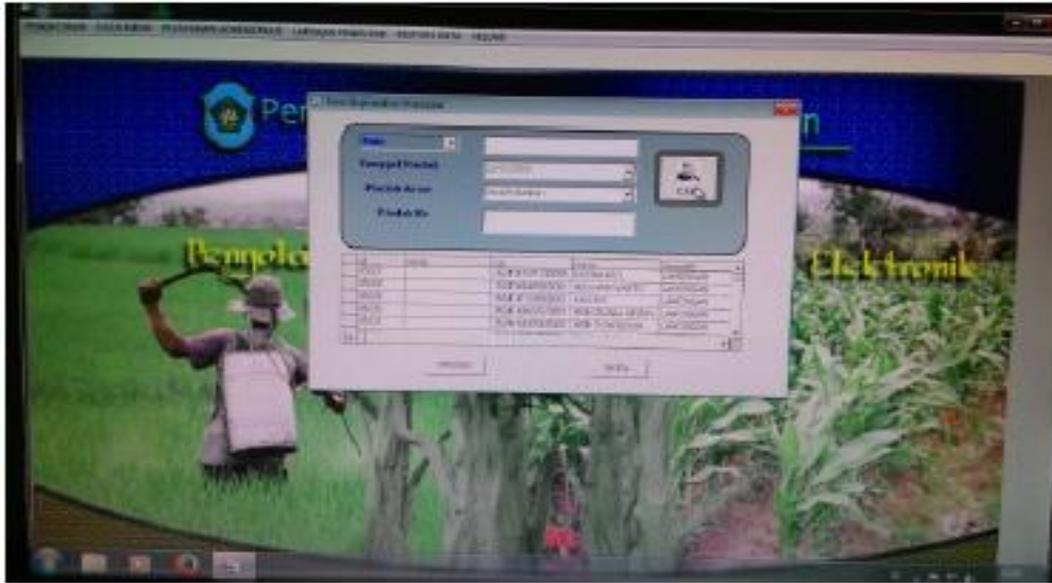
**Gambar 2.13 Sub Menu Pengantar SKCK**

**Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok**

b. Surat Keterangan Pindah

Surat keterangan pindah merupakan surat keterangan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang akan berpindah ke desa ataupun kota lain, surat berikut berisi kan bahwa sesungguhnya memang penduduk tersebut memang berasal dari desa

sebelumnya, serta untuk dapat meminta surat keterangan kependudukan yang baru pada desa atau kota yang baru.



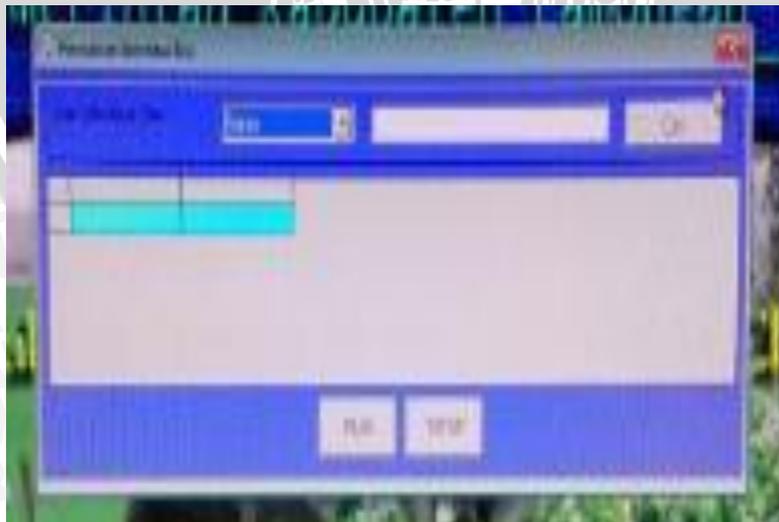
**Gambar 2.14 Menu Surat Keterangan Pindah**

Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

Seperti yang terlihat pada gambar diatas, pada sub menu surat keterangan pindah terdapat beberapa *fill* yang harus diisi, seperti nama pemohon, tanggal pindah, pindah antar, pindah ke. Seluruh *fill* harus diisi dengan data serta keterangan yang sebenarnya.

c. Surat Kesaksian Kelahiran

Untuk mendapatkan suatu akta kelahiran seorang bayi harus memiliki surat kesaksian kelahiran yang didapatkan di Kantor Kepala Desa setempat, surat keterangan tersebut berisikan keterangan lengkap mengenai asal usul bayi tersebut. Tampilah untuk sub menu surat kesaksian kelahiran sesuai dengan Gambar 2.15.



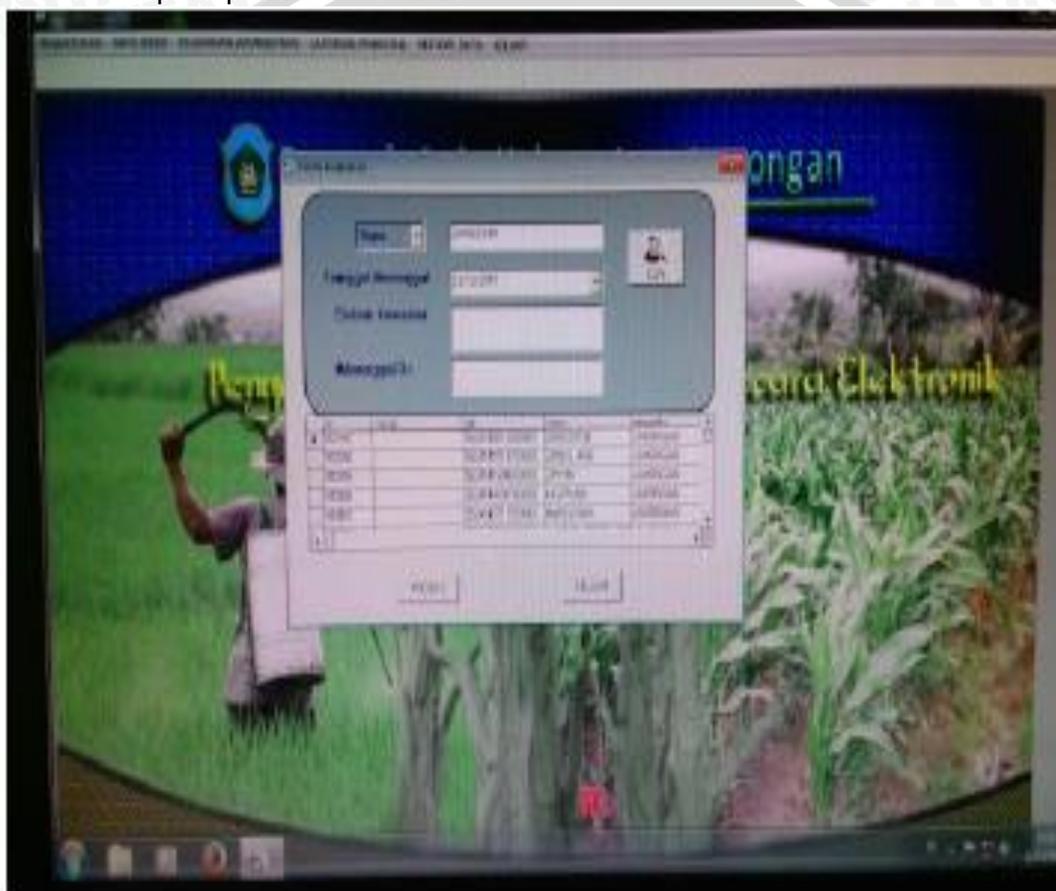
**Gambar 2.15 Sub Menu Surat Kesaksian Kelahiran**

Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

d. Surat Keterangan Kematian

Tidak hanya warga baru yang perlu mendapatkan surat keterangan, warga yang meninggal pun juga memerlukan surat keterangan kematian, ini bertujuan untuk pendataan jumlah warga suatu desa. Surat keterangan kematian didapat di Kantor Kepala Desa dengan melakukan beberapa prosedur pengajuan.

Untuk mendapatkan surat keterangan kematian pengguna perlu memasukkan nama dari warga yang meninggal tersebut, tanggal kematian, sebab kematian, dan tempat kematian. Kemudian pilih *button* cari, dan selanjutnya akan keluar nama yang sesuai masukkan. Tampilan sub menu surat keterangan kematian seperti pada Gambar 2.16.



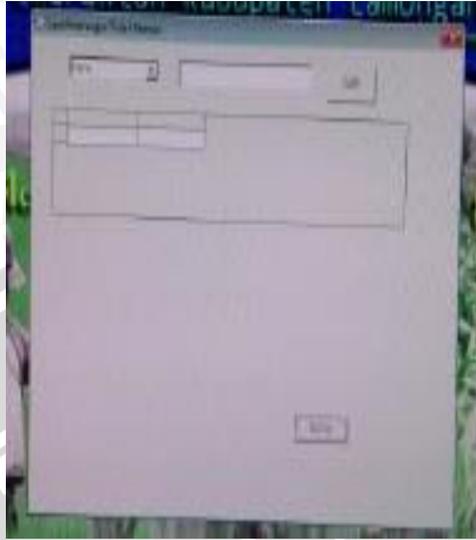
**Gambar 2.16 Sub Menu Surat Keterangan Kematian**  
Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

e. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pada era sekarang pemerintah mulai menjalankan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat kurang mampu, namun untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut warga masyarakat harus memiliki keterangan tidak mampu, surat keterangan itu dikeluarkan oleh pemerintahan desa, PADE sebagai sistem administrasi desa telah memiliki menu untuk membuat surat secara elektronik.

Sesuai dengan tampilan Gambar 2.17, untuk menjalankan sub menu berikut pengguna hanya perlu memasukkan nama pemohon pada kedua kolom *fill* yang

telah disediakan, setelah itu klik pada *button* cari dan akan muncul seluruh nama yang memiliki kesamaan dengan nama pemohon yang telah diinputkan.

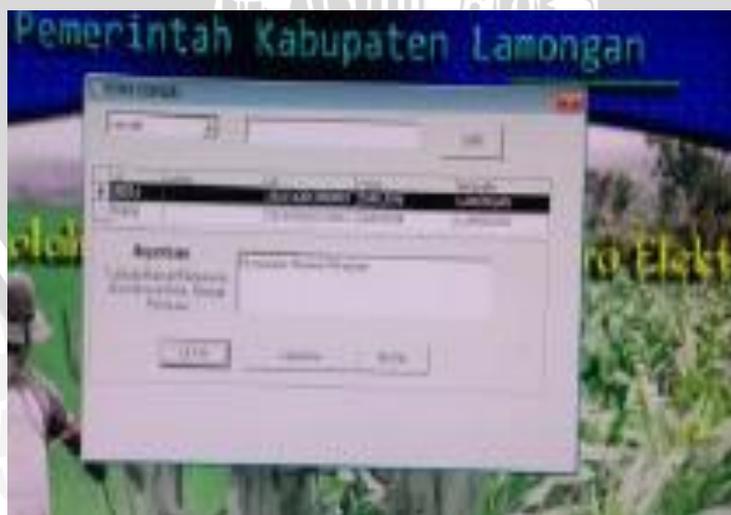


**Gambar 2.17 Sub Menu Surat Keterangan Tidak Mampu**  
Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

f. Surat Keterangan Domisili

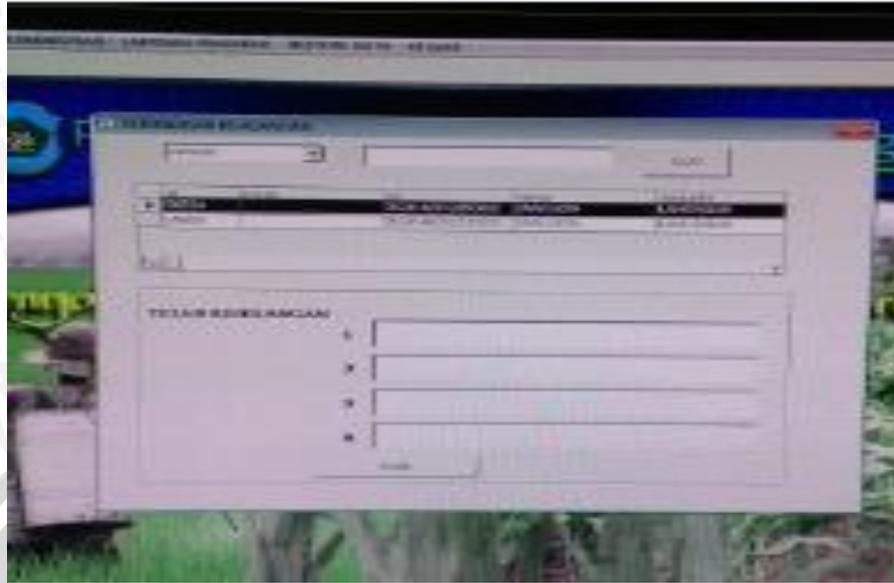
Surat keterangan domisili merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk memberikan keterangan bahwa pemohon memang benar berasal dari desa tersebut.

Untuk mendapatkan surat tersebut, pengguna dapat langsung memasukkan nama pemohon dalam tabel nama dan pilih *button* cari untuk mencari nama yang sesuai. Setelah itu pengguna perlu memasukkan uraian maksud pembuatan surat keterangan domisili sesuai dengan yang diinginkan pemohon. Berikut merupakan tampilan surat keterangan domisili, sesuai dengan Gambar 2.18



**Gambar 2.18 Sub Menu Surat Keterangan Domisili**  
Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

g. Surat Keterangan Kehilangan

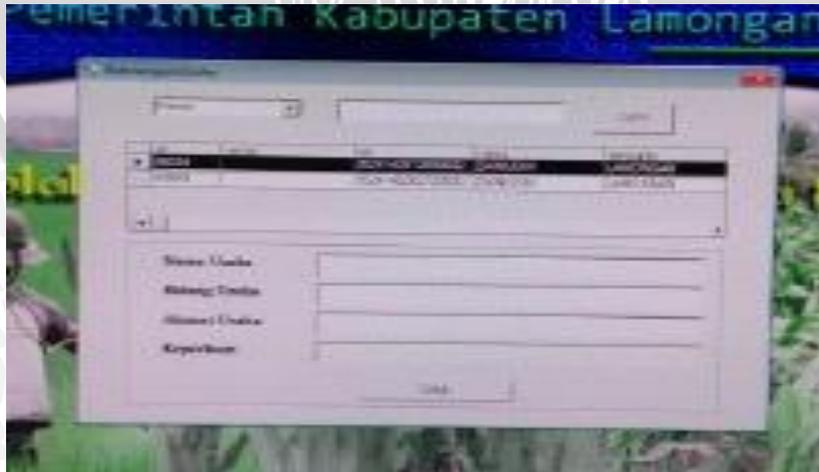


**Gambar 2.19 Sub Menu Surat Keterangan Kehilangan**  
Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

Pada surat keterangan kehilangan, pengguna hanya perlu memasukkan nama pemohon pada kedua kolom nama yang telah disediakan, setelah menemukan data kependudukan sesuai nama pemohon pengguna perlu menambahkan nama atau jenis barang yang telah hilang pada kolom yang telah disediakan seperti pada Gambar 2.19 diatas.

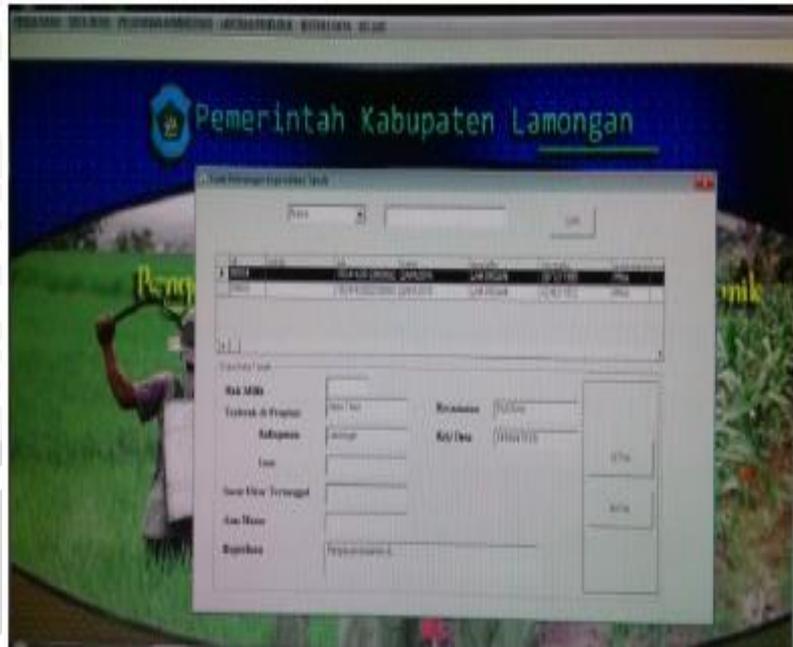
h. Surat Keterangan Usaha

Surat keterangan Usaha sangat diperlukan oleh warga yang memiliki usaha. Pada sub menu berikut pengguna memasukkan nama pemohon pada kedua kolom yang telah disediakan, selanjutnya melakukan pencarian dengan memilih *button* cari sampai menemukan data yang sesuai dengan pemohon, kemudian klik cari. Setelah itu mengisi kolom nama usaha, bidang usaha, alamat usaha, keperluan, kemudian klik cetak untuk mencetak.



**Gambar 2.20 Sub Menu Surat Keterangan Usaha**  
Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

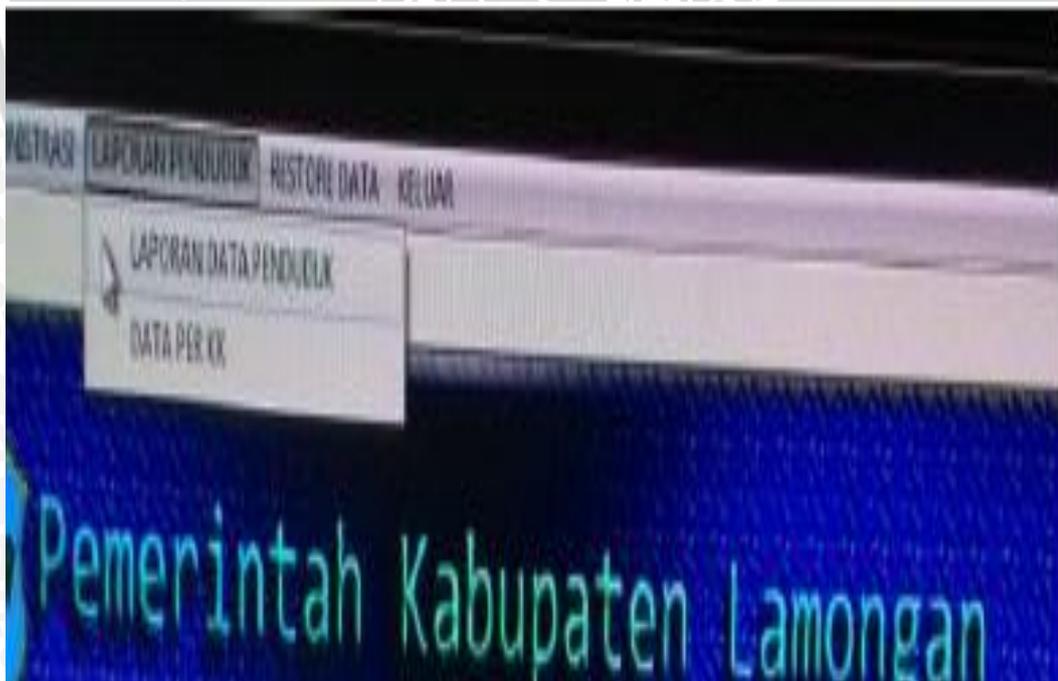
- i. Surat keterangan Kepemilikan Tanah



**Gambar 2.21 Sub Menu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah**  
Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

Pada Gambar 2.21 seperti diatas, pengguna memasukkan nama pemohon, selanjutnya melakukan pencarian data yang sesuai pemohon, kemudian mengisi data-data tanah yaitu hak milik, terletak di propinsi, kabupaten, kecamatan, Kelurahan/Desa mana, luas, surat ukur tertanggal, atas nama, keperluan, kemudian klik cetak untuk mencetak.

- 4. Menu Laporan Penduduk

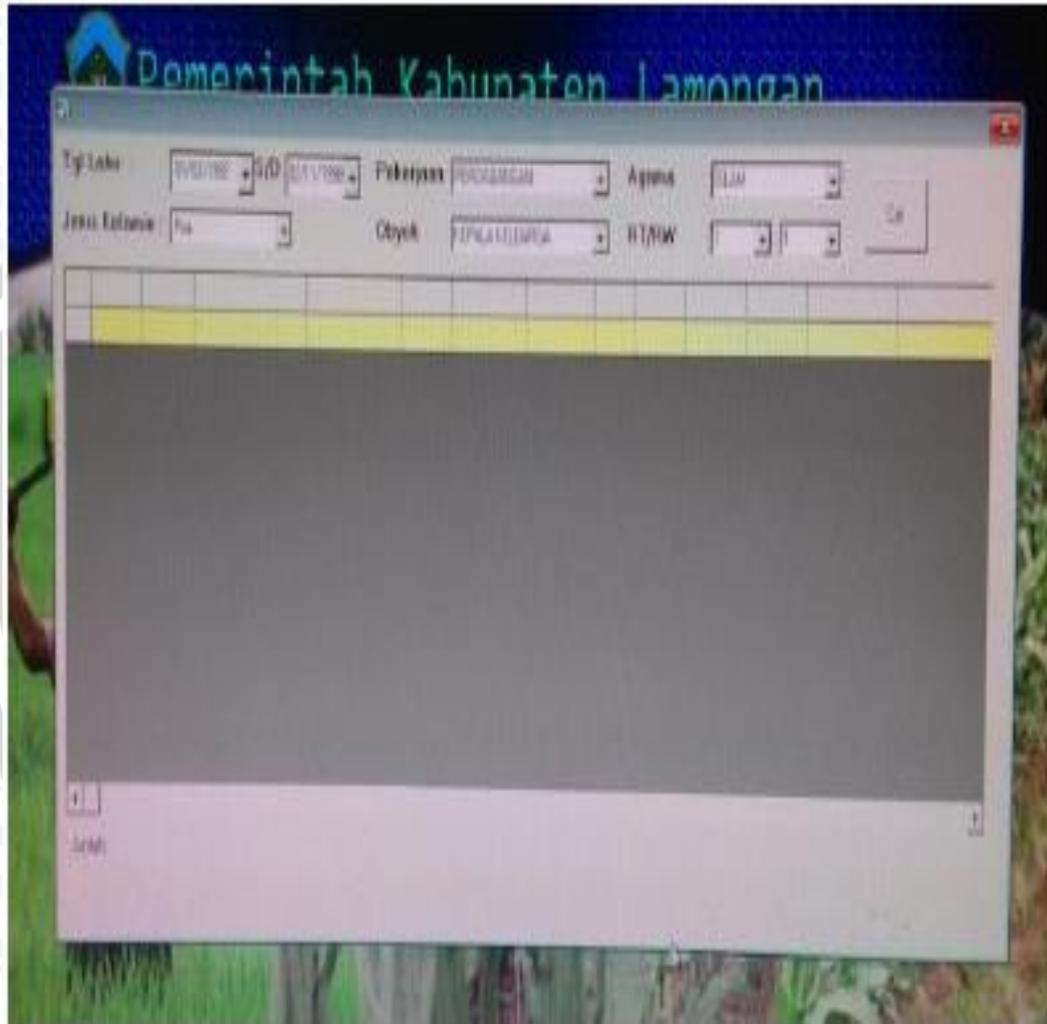


**Gambar 2.22 Menu Laporan Penduduk**  
Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

Menu keempat dari aplikasi Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) adalah laporan penduduk sesuai dengan Gambar 2.22. Menu berikut memiliki dua sub menu, yaitu Laporan Data Penduduk, dan Data Per KK.

a. Laporan Data Penduduk

Laporan data kependudukan digunakan untuk merekap data pekerjaan penduduk dari usia sekian hingga usia sekian. Pada form laporan data kependudukan, pengguna hanya perlu memasukkan tanggal lahir dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa, jenis kelamin, pekerjaan, objek, agama, RT/RW, kemudian klik cari untuk mencari.



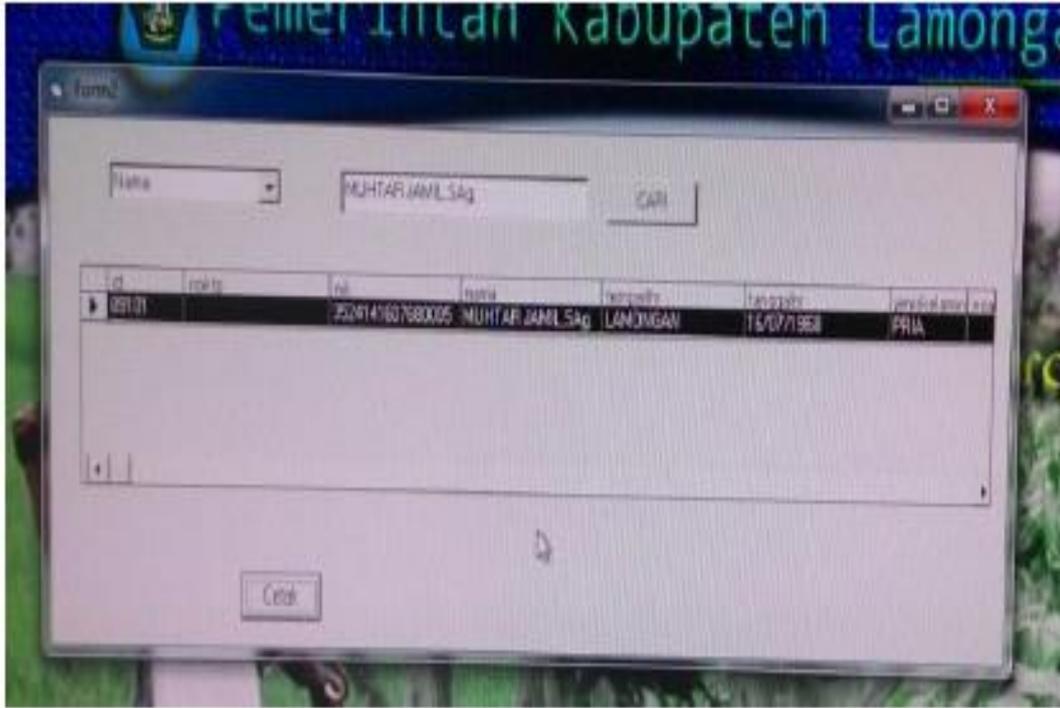
**Gambar 2.23 Sub Menu Laporan Data Penduduk**  
Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

Berbagai macam variasi inputan dapat dilakukan guna mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan oleh pengguna.

b. Data Per KK

Pada form data per KK, pengguna harus mengisi kolom nama dan kolom kosong disampingnya dengan nama yang sama. Misalnya pada kolom nama di ketik "Muhtar Jamil" maka kolom kosong disampingnya juga di ketik "Muhtar

Jamil” kemudian klik cari untuk mencari data per KK yang dibutuhkan, setelah itu klik cetak untuk mencetak.



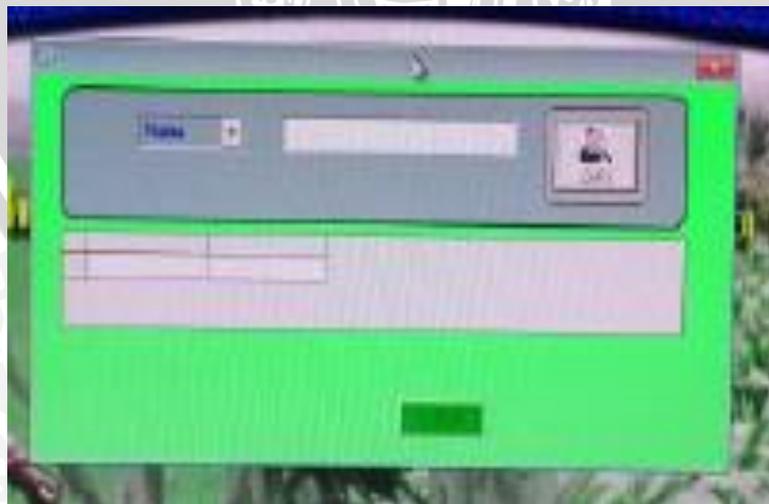
**Gambar 2.24 Sub Menu Data Per KK**  
Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

5. Restore Data

Pada suatu kegiatan pencatatan ada kalanya akan terjadi kesalahan dalam pengolahan data, misalnya saja hilangnya data atau dibutuhkannya data kembali, PADE dilengkapi dengan menu restore dengan menu tersebut diharapkan masalah-masalah diatas dapat ditangani dengan mudah.

Didalam menu restore terdapat dua sub menu, yaitu restore data kematian dan restore data pindah.

a. Restore Data Kematian



**Gambar 2.25 Sub Menu Restore Data Kematian**  
Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

Untuk melakukan restore data kematian, pengguna harus memasukkan nama dari warga tersebut pada kolom yang telah disediakan selanjutnya pilih *button* cari untuk melakukan pencarian sesuai dengan inputan.

b. Restore Data Pindah

Sama halnya dengan sub menu restore data kematian, untuk menggunakan sub menu berikut pengguna hanya perlu memasukkan nama pemohon pada kedua kolom yang disediakan dan kemudian pilih cari.



**Gambar 2.26 Sub Menu Restore Data Pindah**

Sumber : PADE Kantor Desa Brengkok

6. Keluar

Menu yang terakhir adalah menu keluar, seperti pada setiap aplikasi yang lain menu keluar sangat diperlukan mengingat data yang tersimpan pada sistem sangat penting.

## **2.8 Human-Organization-Technology (HOT) Fit Model**

*Human-Organization-Technology (HOT) Fit Model* menurut Yusof (2006) merupakan suatu kerangka baru yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi sistem informasi. Model ini menempatkan komponen-komponen penting dalam sistem informasi yakni manusia, organisasi, dan teknologi serta kesesuaian hubungan di antara ketiganya.

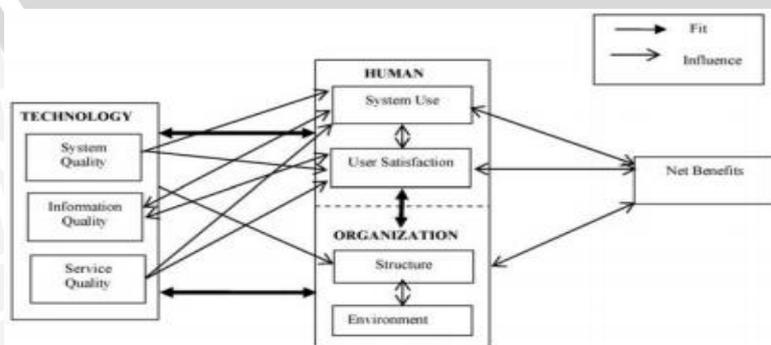
Manusia (*Human*) merupakan komponen penilaian sistem informasi dari sisi penggunaan sistem pada frekwensi dan luasnya fungsi dan penyelidikan sistem informasi dan juga berhubungan dengan siapa yang menggunakan, tingkat penggunaanya, pelatihan, pengetahuan, harapan dan sikap menerima (atau menolak sistem). Komponen ini juga menilai sistem dari aspek kepuasan pengguna yaitu keseluruhan evaluasi dari pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem informasi dan dampak potensial dari sistem informasi. Kepuasan pengguna dapat dihubungkan dengan persepsi manfaat dan sikap pengguna terhadap system informasi yang dipengaruhi oleh karakteristik personal.

Komponen Organisasi (*Organization*) menilai sistem dari aspek struktur organisasi dan lingkungan organisasi. Struktur organisasi terdiri dari tipe, kultur, politik, hierarki, perencanaan dan pengendalian sistem, strategi, manajemen dan komunikasi. Kepemimpinan, dukungan dari top manajemen dan dukungan staf merupakan bagian yang penting dalam mengukur keberhasilan sistem. Sedangkan lingkungan organisasi terdiri dari sumber pembiayaan, pemerintahan, politik, kompetisi, hubungan interorganisasional dan komunikasi.

Komponen teknologi (*Technology*) terdiri dari kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan. Kualitas sistem dalam sistem informasi di institusi pelayanan kesehatan menyangkut keterkaitan fitur dalam sistem termasuk performa sistem dan *user interface*. Kemudahan penggunaan, kemudahan untuk dipelajari, ketersediaan, fleksibilitas, dan sekuritas merupakan variabel atau faktor yang dapat dinilai dari kualitas sistem. Kualitas informasi berfokus pada informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi termasuk rekam medis pasien, laporan dan peresepan. Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kualitas informasi antara lain adalah kelengkapan, keakuratan, ketepatan waktu, ketersediaan, relevansi, konsistensi, dan data *entry*. Sedangkan kualitas layanan berfokus pada keseluruhan dukungan yang diterima oleh *service provider* sistem atau teknologi. *Service quality* dapat dinilai dengan kecepatan respon, jaminan, empati dan tindak lanjut layanan

Sedangkan *Net Benefit* merupakan dampak yang dirasakan oleh individu, organisasi, industri maupun negara dari pengelolaan informasi ataupun kontribusi adanya penerapan sistem informasi.

Berikut merupakan bagan keterkaitan antar komponen dengan dimensi *Human – Organization – Technology (HOT)-Fit Model* :



Gambar 2.27 HOT-Fit Model Framework

Sumber : Yusof (2008)

Pada bagan tersebut menguatkan uraian bahwa komponen penting dalam sebuah Sistem Informasi adalah manusia (*Human*), organisasi (*Organization*), serta teknologi (*Technology*) yang terhubung dengan delapan dimensi keberhasilan Sistem Informasi. Dimensi tersebut adalah penggunaan sistem (*system use*), kepuasan pengguna (*user satisfaction*), struktur organisasi (*organization structure*), lingkungan organisasi (*Organization environment*), kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), kualitas layanan (*service quality*), dan net benefit. Hubungan antar dimensi yang ada dapat digambarkan melalui penjelasan berikut :

1. Kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan, ketiganya mempengaruhi penggunaan sistem, dan kepuasan pengguna,
2. Struktur organisasi dan lingkungan organisasi mempengaruhi penggunaan sistem,
3. Penggunaan sistem yang dalam kinerjanya membutuhkan pengetahuan user dapat mempengaruhi kualitas informasi,
4. Tingkat penggunaan sistem dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna, dalam hal ini ketika pengguna dapat menggunakan dan memanfaatkan sistem,
5. Lingkungan organisasi dapat mempengaruhi politik dan kebijakan pemerintah yang termasuk dalam dimensi struktur organisasi,
6. Net benefit merupakan anteseden dari penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. net benefit juga mempengaruhi penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. hal ini juga berlaku untuk struktur organisasi dan lingkungan organisasi yang merupakan anteseden dari net benefit.

### **2.8.1 Proses Pengumpulan Data**

Didalam penelitian kualitatif terdapat proses pengumpulan data, Data tersebut harus melalui beberapa tahapan yang setiap tahapan tersebut saling memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lainnya. Secara garis besar tahapan tersebut meliputi:

1. Melakukan identifikasi subjek/ partisipan penelitian dan lokasi penelitian.  
Sebagai seorang peneliti kualitatif, harus benar-benar matang dalam melakukan identifikasi partisipan dan lokasi penelitian sebagai pondasi awal penelitian yang akan dilakukan (Creswell dalam Herdiansyah 2010).  
Dalam penelitian berikut peneliti telah melakukan identifikasi subjek serta lokasi penelitian sesuai dengan judul penelitian yang telah ditentukan. Penelitian berikut akan dilakukan pada Kantor Desa Brengkok Kecamatan Brondong, yang merupakan salah satu dari desa percontohan untuk menggunakan sistem informasi pelayanan publik PADE pada Kabupaten Lamongan. Subjek yang diidentifikasi memiliki peranan penting dalam sistem informasi PADE berikut adalah Sekdes Kantor Desa Brengkok selaku pengguna, Kepala Desa Brengkok, pihak Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Lamongan, serta pihak KPDE selaku pengembang

dari sistem informasi PADE tersebut. selbihnya adanya penambahan ataupun pengurangan subjek akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dari penelitian berikut.

2. Mencari dan mendapatkan akses menuju subjek/partisipan penelitian dan lokasi penelitian

Untuk mendapatkan akses menuju partisipan serta lokasi penelitian, peneliti perlu mengajukan beberapa ijin kepada pihak-pihak yang terkait. Untuk mempermudah akses peneliti melakukan pendekatan terhadap beberapa subjek yang memiliki keterkaitan dengan sistem informasi PADE tersebut.

3. Menentukan jenis data yang akan dicari atau diperoleh

Pada tahap ini peneliti merujuk terhadap fokus dari kajian penelitian, tujuan penelitian serta berbagai kebutuhan lain yang dapat mendukung proses penelitian yang dilakukan.

4. Mengembangkan atau menentukan instrumen/ metode pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti akan dapat menuntukan instrumen yang akan dilakukan peneliti berdasarkan judul dan teknik pengumpulan data yang dipilih dari fakta-fakta yang telah didapat sebelumnya.

### 2.8.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian berikut adalah menggunakan analisis data kualitatif, sebagaimana menurut Bogdan & Biklen pada moleong (2010) merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Penelitian berikut akan dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif yang akan dilakukan secara deskriptif dan evaluatif. Pada penelitian awal peneliti akan menganalisis data yang didapat dari lapangan lalu kemudian mendeskripsikannya sehingga menghasilkan suatu hasil analisis yang mendalam.

Deskripsi data diperoleh dari berbagai metode meliputi wawancara, observasi serta dengan analisis kepustakaan. Setelah itu hasil dari penelitian tersebut akan dibawa ketahap analisis sesuai dengan langkah-langkah yang dikemukakan oleh miles dan huberman pada sugiyono (2009) :

1. Reduksi data

Mereduksi data atau merangkum, atau memilih hal-hal pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, yang kemudian dapat mempermudah dalam pencarian tema dan polanya. Hal tersebut bermaksud untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang telah direduksi.

2. Penyajian data

Menyajikan data adalah menggambarkan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Menarik kesimpulan dari data-data yang telah disajikan, dengan mengkaitkan terhadap rumusan masalah. Dan kesimpulan tersebut adalah sebuah gambaran yang remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

Selanjutnya peneliti akan melakukan proses analisis berdasarkan hasil data deskriptif tersebut menggunakan teknik analisis evaluatif, analisis evaluatif merupakan hasil analisa semua temuan dengan dikaitkan pada suatu standar tertentu( kuncoro, 2003). Sehingga data hasil temuan akan dapat dianalisa dan dibandingkan dengan semua sumber yang memiliki keterkaitan dengan penerapan sistem informasi pelayanan publik yang didapat oleh peneliti.

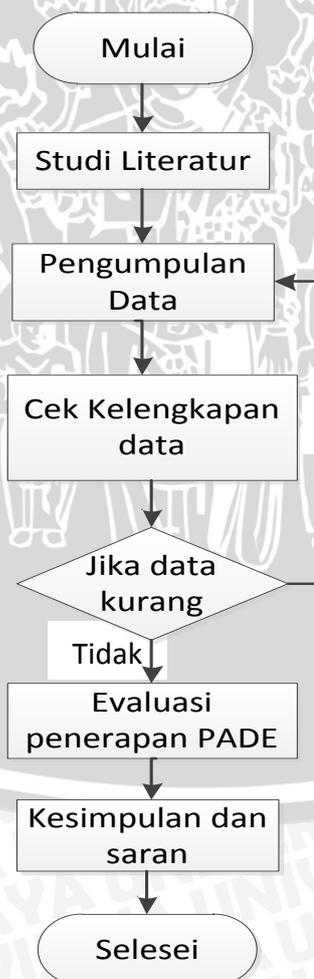


## BAB 3 METODOLOGI

Metodologi memiliki maksud untuk menerangkan suatu proses pengembangan sebuah ilmu pengetahuan dengan tujuan menghasilkan pengetahuan ilmiah yang memungkinkan terjadinya pemecahan masalah praktis tertentu, teori ilmu pengetahuan perlu diterapkan kedalam bentuk proses penelitian empiris. Menurut Zuriyah (2006) proses penelitian empiris meliputi bermacam-macam metode dan teknik yang dikerjakan dalam urutan waktu tertentu.

Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya metode yang digunakan dalam sebuah penelitian berdasarkan tujuan dari penelitian ini adalah penelitian terapan. Menurut Gay dalam (Sugiyono,2011) penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis.

### 3.1 Alur Penelitian



Gambar 3.1 Alur Penelitian  
Sumber : Perancangan

### 3.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian yang berbasis deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian tertentu secara sistematis dan akurat, mengenai sifat – sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan dan menguji hipotesis (Zuriah, 2006). Pemilihan jenis penelitian deskriptif ini karena dalam penelitian akan dijelaskan bagaimana pengembangan dan gambaran penggunaan sistem sistem informasi *E-Government* khususnya pada penggunaan pada Kantor Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hal tersebut telah sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Analisis yang digunakan dalam pendekatan kualitatif berikut adalah analisis data yang didapat dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

#### 3.2.1 Sumber Data

Data merupakan sebuah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang lebih menekankan pada aspek-aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan suatu fakta yang ditemui peneliti di lokasi penelitian. Data yang diperlukan dalam sebuah penelitian mencakup data primer maupun data sekunder.

#### 3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### 3.2.2.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, cara untuk mendapatkan data primer adalah dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait serta melakukan peninjauan objek secara langsung, adapun penjelasannya sebagai berikut :

##### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Soegiyono,2011). Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis guna mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan objek penelitian. Wawancara akan dapat membantu dalam melakukan pengumpulan

data karena dalam sebuah penelitian melalui pendekatan kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen atau alat penelitian itu sendiri.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara yang tidak terstruktur. Peneliti hanya memasukkan inti dari fokus penelitian pada pedoman wawancara namun bersifat bebas dan informal.

## 2. Metode Observasi

Menurut Zuriyah (2006), Observasi merupakan pengamatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian berikut adalah observasi non partisipan, yaitu peneliti datang ketempat lokasi penelitian, namun peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono,2010).

Metode observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu periode dengan guna mendapatkan data yang aktual mengenai sistem informasi yang diterapkan di Kantor Kepala Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Serta meneliti dan mempelajari prosedur pelayanan yang diterapkan melalui sistem informasi tersebut.

Dalam penelitian ini ekspresi, cara menjawab pertanyaan, dan juga bahasa tubuh dari subjek penelitian juga termasuk dalam hal yang akan diamati, agar nantinya dapat dicocokkan dengan jawaban dari subjek sehingga diharapkan dapat menghasilkan jawaban yang reliable.

### 3.2.2.2 Data Sekunder

#### 1. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah berbagai literatur artikel maupun bahan-bahan guna mendapatkan suatu data teoritis yang berhubungan dengan topik penelitian.

### 3.2.3 Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Purposive Sampling (Judgemntal Sampling), penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Dimana metode tersebut dirasa telah sesuai dengan tujuan dari peneliti.

### 3.2.4 Instrumen Penelitian

Menurut Muhammad dan Djaali (2005), Dalam bidang penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian. Jadi instrumen penelitian dapat dipergunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang diperlukan dalam sebuah penelitian.

Instrumen yang akan dipergunakan dalam penelitian kali ini antara lain,

#### 1. Peneliti Sendiri

Dalam penelitian kualitatif peneliti akan bertindak sebagai instrumen penelitian. Peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, dan penafsir data dari penelitian itu sendiri.

## 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan serangkaian pertanyaan pokok yang telah disusun oleh peneliti guna diajukan kepada narasumber sebagai pedoman yang akan mengarahkan peneliti dalam pencarian data pada saat wawancara.

## 3. Catatan Lapangan (field notes)

Catatan lapangan merupakan sebuah argumen dari peneliti berdasarkan kejadian-kejadian dilapangan yang biasanya didapat peneliti setelah melakukan pengamatan serta wawancara. Catatan lapangan biasanya juga berisikan hasil dari penelitian dilapangan yang diperoleh peneliti yang nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber data.

Metode kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah berbagai literatur artikel maupun bahan-bahan guna mendapatkan suatu data teoritis yang berhubungan dengan topik penelitian.



## BAB 4 EVALUASI PADE MENGGUNAKAN HOT-FIT MODEL

Untuk melakukan evaluasi pada sistem informasi Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik atau PADE, peneliti menggunakan *framework* yang telah dirancang oleh Yusof at al yaitu HOTFit Model, dimana *framework* tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ada tiga pokok elemen dan beberapa dimensi pendukung yang digunakan untuk melakukan evaluasi PADE tersebut.

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan data evaluasi dari penelitian sebelumnya terhadap sistem yang sama namun ditempat yang berbeda yaitu di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Data evaluasi tersebut juga digunakan sebagai panduan, perbandingan serta bahan uji terhadap desa yang berbeda.

Penelitian ini berbasis deskriptif kualitatif, dimana hal tersebut akan membuat penilaian evaluasi dilakukan secara subjektif namun tetap berdasar pada instrumen evaluasi HOT Fit Model. Metode wawancara yang dilakukan pada pengumpulan data dilakukan berdasarkan draft pertanyaan yang ada pada Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pengguna dan Lampiran 2 Pedoman Wawancara *Stakeholder* yang telah sesuai dengan indikator-indikator yang ada pada HOT Fit Model yang dijelaskan oleh Yusof (2013).

### 4.1 *Technology* (Teknologi)

Pada elemen teknologi terdapat tiga dimensi utama yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi, yaitu kualitas sistem, informasi dan layanan. Pada pembahasan pertama ini peneliti akan memulai dengan kualitas sistem, dimana didalamnya mencakup tentang dorongan penggunaan sistem, ketersediaan informasi secara up to date serta kemampuan PADE dalam berintegrasi dengan sistem-sistem yang lain.

#### 4.1.1 Kualitas Sistem

##### 4.1.1.1 *Ease Of Use*

*Ease of use* atau kemudahan dalam penggunaan sistem, adalah suatu kemudahan dalam penggunaan akan mempengaruhi dorongan akan penggunaan system tersebut, berkaitan dengan kepuasan dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem, serta terkait dengan keterpaksaan atau ketersediaan pengguna untuk menggunakan sistem PADE tersebut.

Pada Kantor Kepala Desa Brengkok terdapat beberapa staf aparatur desa yang telah ditugaskan untuk mengelola atau menggunakan sistem PADE tersebut dalam pekerjaan pelayanan setiap harinya. Mulai dari Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi KesMas, Kasi Ekbang, Kasi Trantib, serta Kasi Pemb. Pemerintahan. Meskipun banyak ditemukan kendala dalam penggunaan sehari-hari namun seluruh pengguna mengatakan bahwa mereka sangat senang dengan adanya sistem tersebut, bahkan mereka mempunyai harapan yang tinggi untuk kedepannya. Berikut kutipan hasil wawancara dengan pertanyaan nomor 1a

berdasarkan komponen teknologi seperti yang tertera pada lampiran 1 pedoman wawancara :

1. Pernyataan Bapak Shobikin selaku Sekretaris Desa Brengkok :  
 “Semenjak ada PADE pekerjaan kami semakin mudah, pelayanan juga semakin cepat sehingga masyarakat menjadi semakin puas dengan layanan yang kami berikan. Fitur-fitur yang cukup lengkap membuat data yang ada semakin rapi dan mudah untuk dikerjakan.”(Jumat 11 Maret 2016, pukul 08.40).
2. Pernyataan Bapak Nurhadji selaku Kaur Umum :  
 “Alhamdulillah pekerjaan saya sekarang semakin ringan, ya meskipun perlu belajar lagi dari nol tapi sistem ini sangat membantu, awalnya susah sekali mas tapi lama-lama ya sudah terbiasa.” (Jumat 11 Maret 2016, pukul (10.35)

Keluhan tentang perlunya memahami sistem dari awal juga diungkapkan dari pengguna yang lain, karena tidak banyak yang memiliki keterampilan dalam menjalankan system, namun secara garis besar pengguna memberikan kesan puas akan kinerja sistem PADE berikut.

Dalam indikator *ease of use* atau kemudahan dalam penggunaan, dapat disimpulkan bahwa Sekretaris serta Kaur Umum Desa Brengkok selaku pengguna merasakan kemudahan dalam penggunaan PADE, PADE juga sangat membantu pekerjaan mereka dalam proses pelayanan yang dilakukan sehari-hari.

#### 4.1.1.2 Availability

*Availability* memiliki keterkaitan dengan ketersediaan data secara *up to date* dan kemampuan dari PADE untuk melakukan integrasi dengan sistem-sistem yang lain. Dalam point ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Shobikin selaku Sekretaris Desa Brengkok bahwa data yang terdapat dari hasil PADE bisa dikatakan sangat akurat, karena dalam kinerja sistem, PADE dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat memepermudah pengguna dalam melakukan perubahan data jika terjadi kesalahan dalam *inputan* yang dilakukan sebelumnya. Berikut kutipan hasil wawancara yang menjawab pertanyaan 1b dan 1c berdasarkan lampiran 1 pedoman wawancara pengguna :

Bapak Shobikin selaku Sekretaris Desa :

“Iya mas data yang ada sudah sangat akurat, data-datanya sudah sesuai dengan dilapangan, kalau masalah *update* saya biasanya ngerjainnya pas waktu senggang mas kalau lagi rame tamu ya gak bisa tapi buat sekarang data yan ada sudah sesuai dengan dilapangan. Untuk integrasi sistem sampai saat ini sempat terjadi beberapa kali eror sistem pada saat saya install aplikasi lain yang dikasih sama pemdes mas, saya gak tau kenapa jadi saya bawa aja ke pemdes sana yang benerin, tapi PADE tidak online mas.” (Jumat 11 Maret, pukul 08.40)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak nurhadji selaku kaur umum:

“Untuk melakukan *update* itu biasae pak SekDes mas yang ngerjain, tapi kalau memang labi sibuk biasae beliau ngasih tugas itu ke saya.” (Jumat 11 Maret 2016, pukul 10.35)

Untuk desain dari sistem PADE ternyata memang tidak terhubung dengan desa – desa yang lain, data hanya akan disimpan pada *server* lokal masing- masing desa. Data yang telah didimpan didesa tersebut secara berkala akan dilaporkan kepada pemerintahan desa sebagai laporan secara berkala. Berikut hasil wawancara dengan pertanyaan nomor 1b berdasarkan Lampiran 2 Pedoman Wawancara *Stakeholder* :

Pernyataan Kasubag TATA Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Lamongan :

“PADE memang tidak didesain untuk online mas, terkait data-datanya yang sangat penting ditakutkan malah terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.” ( Senin 14 Maret 2016, pukul 10.20)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh *fasilitator* PADE dari pihak KPDE Kabupaten Lamongan :

“Oiya mas pada gagasan awalnya memang PADE akan dionlinekan dapat terhubung antar desa namun pada saat pengembangan sistem ternyata data yang akan dikelola oleh PADE merupakan data penting bagi masing-masing desa sehingga untuk saat ini PADE masih berjalan secara offline, kedepannya mungkin semua data bisa disimpan diserver utama dan dapat diakses oleh pihak yang terkait saja.” (rabu 16 Maret 2016, pukul 08.30)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi kualitas sistem sampai saat ini PADE masih tergolong sistem yang diunggulkan. Meskipun masih terdapat banyak kekurangan yang ditemukan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan sistem PADE tersebut memberikan kemudahan dalam pekerjaan aparatur desa dalam melayani masyarakat.

#### **4.1.2 Kualitas Informasi**

Pada dimensi Kualitas informasi melingkupi kelengkapan informasi serta ketersediaan dari informasi itu sendiri. Apakah informasi yang dihasilkan dari sistem PADE tersebut sudah lengkap dan memiliki nilai guna bagi instansi terkait. Berikut hasil wawancara mengenai pertanyaan nomor 2a berdasarkan Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pengguna :

“Informasi yang dihasilkan dari PADE sudah lengkap, sampai saat ini informasi yang dihasilkan sangat berguna bagi kami kok mas, misalnya dari hasil pengolahan informasi data kependudukan ini, Kasi Ekbang bisa mudah buat memetakan potensi-potensi dari desa yang sebelumnya belum kita tau.” (Jumat 11 Maret 2016, pukul 08.40)

#### **4.1.3 Kualitas Layanan**

Kualitas layanan terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan untuk melakukan penilaian terhadap sistem yaitu kecepatan respon serta jaminan.

Jaminan dalam hal ini berkaitan tentang keseluruhan dukungan dari penyedia layanan. yang dimaksud adalah seluruh penanggung jawab atas sistem PADE tersebut, pihak yang akan terlibat dalam penanggulangan masalah-masalah dalam jalannya sistem PADE tersebut. Berikut berikut hasil wawancara dengan pertanyaan nomor 3a dan 3b berdasarkan Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pengguna :

Bapak Shobikin, Sekretaris Desa Brengkok :

“Untuk layanan yang sekarang sudah sangat cepat mas, lebih prima. Dulu untuk satu pelayan kita butuh waktu paling cepet 15 menit sedangkan sekarang kita cuma butuh waktu 5-10 menit. Sampai sekarang kita dapat aplikasinya dari Pemdes mas, kalo terjadi masalah – masalah ya kalau bisa saya benerin sendiri ya saya benerin sendiri, tapi kalo ndak ya saya bawa ke pemdes, biasanya langsung dibantu sama sana.” (Jumat 11 Maret 2016, pukul 08.40)

Hal tersebut diperkuat oleh jawaban kasubag Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Lamongan berdasarkan pertanyaan nomor 2a pada Lampiran 2 Pedoman Wawancara *Stakeholder* :

“Oiya mas kalo terjadi masalah terkait itu ya kami bantu, bukan Cuma PADE saja tapi dari seluruh aplikasi yang kami berikan kalau terjadi kesalahan ya kami bantu. Itu sudah tugas kami, tapi khusus untuk PADE karen itu program kerjasama PEMDES dengan KPDE ya kalo memang kami gak bisa bantu ya kita arahkan untuk ke KPDE langsung.” ( senin 14 maret 2016, pukul 10.30)

Pernyataan tersebut dipertegas oleh pihak KPDE kabupaten Lamongan

“Iya kami siap membantu jika terjadi eror,kerusakan pada PADE ataupun yang mau install ulang PADE.” (rabu 16 Maret 2016, pukul )

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem PADE tersebut kualitas layanan dari Kantor Kepala Desa Brengkok meningkat. Layanan yang sebelumnya membutuhkan waktu antara 15-20 menit sekarang hanya membutuhkan waktu 5-10 menit dalam setiap pelayanannya. Selain itu jaminan terhadap sistem juga sangat diperhatikan hal itu dapat dikuatkan dengan semua pihak yang ikut membantu menjaga dan meraway sistem PADE tersebut.

Berikut merupakan poin-poin yang diperoleh dari penjabaran diatas, dengan tujuan agar mudah dipahami oleh pembaca.

**Tabel 4.1 Temuan Dalam Komponen Teknologi**

Dimensi	Temuan
Kualitas sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data yang akurat</li> <li>- Tampilan kurang menarik</li> <li>- Sedikit susah dipahami</li> <li>- Kurang dapat berinteraksi dengan sistem lain</li> </ul>

<p><b>Kualitas Informasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lamanya upgrade sistem</li> <li>- Informasi yang didapat sangat berguna</li> <li>- Informasi yang sangat akurat</li> <li>- Pelaporan yang tidal real time</li> </ul>
<p><b>Kualitas Layanan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan jauh lebih cepat</li> <li>- Tidak adanya staff khusus IT</li> <li>- Respon cepat dalam memberikan perbaikan</li> <li>- Jaminan terhadap sistem sangat dijaga</li> </ul>

Sumber : Yusof (2013)

## 4.2 Human (Manusia)

*Human* atau Manusia merupakan elemen yang mencakup bagaimana keterkaitan system terhadap pengguna. Pada elemen ini akan dijelaskan beberapa aspek yang lebih menitik beratkan pada penilaian *user* atau pengguna, serta berdasarkan kepuasan pengguna akan sistem PADE tersebut.

Kedua dimensi tersebut telah dapat mewakili bagaimana penilaian *user* atau pengguna mengenai sistem PADE tersebut. diharapkan penilaian dari pengguna dapat memberikan masukan untuk sistem PADE dalam jangka waktu kedepan. Wawancara yang dilakukan berdasarkan Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pengguna dan Lampiran 2 Pedoman Wawancara Stakeholder pada komponen Manusia

### 4.2.1 Penggunaan Sistem

Berkaitan dengan penggunaan sistem berdasarkan kewajiban atau hanya sukarela saja, selanjutnya adalah pada pengetahuan pengguna, harapan pengguna, serta sikap menerima atau menolak sistem tersebut. Indikator dari pengguna sistem yaitu dilihat dari manfaat PADE bagi pekerjaan pengguna, serta apakah PADE tetap harus dijalankan atau tidak.

#### 4.2.1.1 Who use It

*Who use it* atau siapa yang bertanggung jawab terhadap jalannya sistem, serta siapa yang diberikan wewenang untuk mengelola PADE. Mengingat bahwa PADE memiliki data yang penting bagi suatu desa maka membatasi pengguna merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data kependudukan tersebut.

Setiap instansi/desa memiliki kebijakan yang berbeda untuk siapa yang diberikan akses ke PADE, hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya manusia yang tidak merata. Pada Kantor Kepala Desa Brengkok sistem PADE dijalankan oleh beberapa pihak, mulai dari pengguna utama adalah Bapak Shobikin selaku Sekretaris Desa Brengkok, yang dibantu oleh Bapak Nurhadji selaku Kaur Umum, serta seluruh Kasi yang ada di Kantor Kepala Desa Brengkok sebagai pengguna data yang telah siap. Berikut hasil wawancara dengan pertanyaan 1a berdasarkan Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pengguna :

Pernyataan Bapak Shobikin selaku pengguna utama :

“Untuk PADE sebenarnya seluruh staf yang ada dikantor ini bisa menggunakan mas, karena memang kita sudah melakukan modifikasi. Tapi sesuai tugasnya memang sampai saat ini saya yang memegang secara penuh dibantu sama pak Kaur Umum. Untuk yang lain cuma untuk melihat data penduduk dan desa aja.” (Jumat 11 Maret 2016, pukul 08.40)

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nurhadji selaku Kaur Umum Kantor Kepala Desa Brengkok

“Yang memegang PADE ya hanya Pak SekDes mas biasanya ya kalo beliaunya sibuk sekali ya saya yang disuruh untuk membantu. Untuk yang lain cuma bisa ambil data nya aja mas ya maklum kita gak punya orang IT ya kita belajar otodidak ya pelan-pelan gini mas.” (Jumat 11 Maret 2016, pukul 10.35)

Dan hal ini dikuatkan dengan pernyataan oleh Kasi Pemerintahan yaitu Bapak Inarto.

“saya cuma bisa lihat data kependudukannya aja mas kalo ada keperluan tentang data penduduk saja. Untuk yang lainnya saya masih bingung susah mas.” (Sabtu 12 Maret 2016, pukul 09.30)

Hal ini menjelaskan bahwa pengguna sistem PADE sampai saat ini hanya Bapak Shobikin Sekretaris Desa dan Bapak Nurhadji selaku Kaur Umum yang membantu Bapak Shobikin. Hal ini mengindikasikan bahwa memang terdapat kesenjangan kemampuan dalam mengelola sistem informasi seperti PADE tersebut.

#### **4.2.1.2 Level Of User**

*Level of user* merupakan tingkatan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan sistem informasi. Bagaimana kemampuan dari para pengguna PADE pada Brengkok. Apakah kemampuan penggunaan sistem memiliki dampak dari pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat luas.

Berikut merupakan pernyataan Bapak Shobikin selaku pengguna mengenai apa itu PADE sesuai pertanyaan nomor 2a berdasarkan Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pengguna :

“PADE itu pengelolaan administrasi berbassis online mas, tapi sampai sekarang belum online juga. Fitur yang ada di PADE lumayan lengkap mas, sangat membantu pekerjaan saya.” (Jumat 11 Maret 2016, pukul 08.40)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai kemampuan dari pengguna sistem informasi PADE, dapat dikatakan bahwa Bapak Shobikin telah cukup terbiasa menggunakan sistem tersebut, meskipun masih terdapat beberapa kendala mengenai penggunaannya. PADE ternyata juga bukan merupakan sistem informasi pertama yang beliau gunakan, sehingga hal tersebut semakin memudahkan beliau dalam beradaptasi dengan PADE.

#### 4.2.1.3 Pelatihan, Pengetahuan, dan Harapan

Menjelaskan ada atau tidaknya pelatihan, mengenai pengetahuan umum para pengguna PADE, serta mengenai harapan para pengguna tentang adanya sistem informasi PADE.

Menurut pernyataan Bapak Shobikin sebelum beliau menggunakan sistem PADE tersebut, memang terdapat pelatihan yang diadakan di Desa Latuan, pelatihan tersebut dihadiri perwakilan dari setiap desa percontohan untuk melakukan pembekalan mengenai apa itu PADE serta seperti apa cara untuk menjalankannya. Berikut jawaban Bapak Shobikin terkait pertanyaan nomor 2b berdasarkan Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pengguna :

“Iya mas dulu pernah sebelum PADE dibagikan kita disuruh hadir di Latuan buat pembekalan awal, seluruh desa percontohan diharapkan mengirim perwakilan untuk pelatihan itu, dan kebetulan dari Desa Brengkok saya sendiri yang berangkat.” (Jumat 11 Maret 2016, pukul 08.40)

Hal tersebut dikuatkan oleh kasubag Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Lamongan Bapak Teguh Wijono, sesuai dengan Lampiran 2 Pedoman Wawancara *Stakeholder* nomor 1a:

“Kita adakan pembekalan awal untuk para pengguna mengenai PADE, dulu kita adakan di desa Latuan Kecamatan Karanggeneng, kalo gak salah ada 100 sekdes dan 12 sekretaris kelurahan yang diundang dalam pembekalan itu.” (senin 14 maret 2016, pukul 10.30)

Selain pelatihan yang dirasa diperlukan peneliti juga memberikan pertanyaan mengenai harapan pengguna mengenai sistem PADE berikut. Menurut penuturan Bapak Shobikin bahwasanya beliau sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pelayan publik disektor bawah, beliau juga mengharapkan PADE tidak hanya bersifat sementara namun dapat berlanjut dengan sistem-sistem lain yang akan membantu proses pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif.

“Saya sangat mengapresiasi adanya inovasi pemerintah pusat mengenai PADE Saya berharap ada kelanjutan dari pemerintah pusat mengenai sistem seperti ini. Bukan hanya bersifat sementara.” (Jumat 11 Maret 2016, pukul 08.40)

#### 4.2.1.4 Sikap Menerima (Acceptance), Menolak (Resistance)

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengguna telah dapat beradaptasi dengan sistem PADE tersebut. terutama untuk Bapak Shobikin beliau telah menggunakan PADE sebagai sistem utama dalam pekerjaan pelayanan yang beliau lakukan sehari-hari. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pengguna dalam hal ini Bapak shobikin telah dapat menerima keberadaan sistem PADE dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan PADE secara maksimal.

#### 4.2.2 Kepuasan Pengguna

Terkait dengan pengalaman pengguna dalam menggunakan PADE meliputi sikap yang menunjukkan karakteristik pengguna. Kepuasan pengguna dilihat dari apakah informasi yang ada di PADE bisa membantu pekerjaan mereka dan kepuasan dari informasi yang dihasilkan oleh PADE.

##### 4.2.2.1 Usefulness

Menilai bagaimana sistem dari aspek kegunaan atau fungsi bagi manusia dalam hal ini pengguna. Fungsi atau manfaat yang diperoleh dari berjalannya sistem PADE tersebut dapat dirasakan bagi para pengguna. pada Kantor Kepala Desa Brengkok, Bapak Shobikin menjelaskan bahwa manfaat yang didapat dari PADE sangat bisa dirasakan, beliau sangat senang karena pelayanan yang terjadi jauh lebih singkat daripada sebelumnya. Berikut kutipan hasil wawancara dengan pertanyaan nomor 3a berdasarkan Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pengguna :

“Semenjak ada PADE pekerjaan kami semakin mudah, pelayanan juga semakin cepat sehingga masyarakat menjadi semakin puas dengan layanan yang kami berikan. Fitur-fitur yang cukup lengkap membuat data yang ada semakin rapi dan mudah untuk dikerjakan. Saya harap akan ada sistem-sistem lain yang dapat membantu seluruh pekerjaan di sektor desa supaya pelayanan lebih prima lagi.”(11 maret 2016, pukul 08.40)

##### 4.2.2.2 Sikap User Berdasarkan Karakteristik Pengguna

Pada aspek berikut hampir sama dengan harapan para pengguna mengenai sistem untuk kedepannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Bapak Shobiki memiliki harapan yang tinggi kepada pemerintah pusat mengenai adanya sistem-sistem yang lain yang dapat membantu pekerjaan sektor desa. Selain untuk beliau juga berharap adanya update sistem, update sistem dalam hal ini mengenai perbaikan bug atau juga peningkatan fitur dari PADE. Berikut penjelasan beliau :

“ iya saya berharap bisa terus ada inovasi mengenai sistem serupa. Selain itu untuk PADE sendiri saya harap adanya perbaikan dari segi tampilan agar lebih mudah untuk dipelajari serta penambahan modul atau kalau bisa diadakan pelatihan lagi supaya kita selaku pengguna dapat memahami lebih dalam soal PADE.” (Jumat 11 Maret 2016, pukul 08.40)

Berikut merupakan poin-poin kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran diatas

**Tabel 4.2 Temuan Dalam Komponen Manusia**

<i>Dimensi</i>	<i>Temuan</i>
<b>Penggunaan Sistem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan pengguna</li> <li>- Kurangnya SDM</li> <li>- Kurangnya wawasan masyarakat tentang SI</li> </ul>

**Kepuasan Pengguna**

- Menjadi sistem unggulan
  - Para staff dapat menerima perubahan sistem
  -
- 
- Kepuasan pengguna berkisar antara 70-80%
  - PADE sangat membantu dalam pekerjaan sehari-hari
  - Pelayanan dapat meningkat menjadi lebih cepat.

Sumber : Yusof (2013)

**4.3 Organization (Organisasi)**

Pada elemen organisasi terdapat dua dimensi utama yang dapat digunakan sebagai penilaian, yaitu menilai berdasar struktur organisasi serta menilai dari lingkungan organisasi. Terdapat beberapa kutipan wawancara berdasarkan Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pengguna dan Lampiran 2 Pedoman Wawancara Stakeholder mengenai komponen organisasi.

**4.3.1 Struktur Organisasi**

Didalam dimensi struktur organisasi terdapat beberapa aspek yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan penilaian terhadap elemen organisasi berdasarkan struktur organisasi.

**Tabel 4.3 Susunan Kepengurusan PADE**

No.	Kedudukan Dalam Keanggotaan	Keterangan
1.	Penasehat	a. Bupati Lamongan b. Wakil Bupati Lamongan
2.	Pembina	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan b. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan d. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
3.	Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan



4.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
5.	Keanggotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Seksi Pemeliharaan Data Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan</li> <li>b. Kepala seksi Manajemen Informasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan</li> <li>c. Eri Setiawan, S.Kom. Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan</li> <li>d. Abdul Yasak, ST. staf Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan</li> <li>e. Anton Purnawirawan, S.ST staf Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan</li> <li>f. Mch. Zamroni, S.sos Staf Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>g. Nur Rahmawati KD, S.STP. staf Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan</li> </ul>

Sumber : Lampiran Bupati Kabupaten Lamongan (2013)

#### 4.3.1.1 Perencanaan dan Pengendalian Sistem

Dalam aspek berikut bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan sistem PADE untuk dijalankan, dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan setelah sistem PADE berikut telah berjalan.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Brengkok yaitu Bapak Shobikin, bahwasanya gagasan mengenai sistem PADE tersebut telah berjalan cukup lama, namun pada tahun 2013 sistem PADE baru dapat dijalankan 42 desa percontohan. Berikut kutipan wawancara mengenai pertanyaan nomor 1a berdasarkan Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pengguna :

“Sebenanya PADE udah digodok dari tahun 2008 mas, tapi memang baru selesai pada tahun 2013, itupun masih digunakan di 42 percontohan setelah dinyatakan berjalan di 10 desa percontohan ditahap awal.” (Jumat 11 Maret 2016, pukul 08.40)

#### 4.3.1.2 Manajemen dan Komunikasi

Bagaimana pengelolaan sistem PADE di Kantor Kepala Desa brengkok, apakah seluruh karyawan yang berada di instansi tersebut dapat menerima, dan seberapa jauh sistem tersebut dapat memberikan dampak positif bagi instansi tersebut.

Dalam pengelolaan sistem PADE, Kantor Kepala Desa Brengkok merupakan salah satu desa yang memiliki inovasi tersendiri dalam proses operasioanalnya. Pada tahap awal PADE hanya akan diinstall pada satu PC yaitu PC yang digunakan oleh Bapak Sekdes, namun berkat kemauan akan peningkatan pelayanan prima yang efisien dan efektif, dengan pengaturan manajemen yang bagus serta adanya komunikasi dari seluruh aspek di instansi tersebut saat ini PADE dapat diakses melalui beberapa PC yang terdapat dimasing – masing meja Kasi. Dengan demikian tugas dari masing-masing orang dapat diselesaikan secara lebih cepat.

#### 4.3.1.3 Kepemimpinan

Bagaimana pengaruh *Top Manajemen* dalam berjalannya sistem PADE tersebut, apakah terdapat dukungan dari seluruh staf yang di Kantor Desa Brengkok terhadap penggunaan sistem.

Berikut pernyataan Bapak Praseno Selaku Kepala Desa Brengkok untuk menjawab nomor 1b berdasarkan Lampiran 2 Pedoman Wawancara Pengguna :

“PADE merupakan suatu inovasi dari pemerintah kabupaten Lamongan dalam upaya peningkatan pelayan publik tentu saja kami harus mendukung secara penuh inovasi tersebut. karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal seluruh aspek yang terkait harus saling mendukung satu sama lain. Dan meskipun pemerintah tidak memberikan inovasi tentang sistem PADE tersebut kami dari desa pun akan berupaya untuk membuat sistem yang seperti itu secara mandiri.”  
(Kamis 10 Maret 2016, pukul 01.10)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak shobikin selaku Sekretaris Desa,

“Bapak Kades sangat mendukung soal PADE ini mas, beliau sudah mewanti-wanti agar semua staf tidak buta teknologi, semua staf harus dapat mengoprasikan teknologi telebih sistem PADE. Dulu sudah ada sistem seperti PADE ini hasil usaha mandi dari desa, tapi memang jauh lebih sederhana dari PADE ini.” (Jumat 11 Maret 2016, pukul 08.40)

#### 4.3.2 Lingkungan Organisasi

Terkait dengan sumber dana, dan peraturan pemerintah yang melandasi adanya program PADE tersebut.

##### 4.3.2.1 Sumber Pembiayaan

Proyek PADE tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD. Untuk pembiayaan operasional serta perawatan *hardware* dilakukan oleh masing-masing instansi. Sesuai Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/324/kep/413.013/2013 Pemerintah Kabupaten Lamongan memulai sebuah program Pengelolaan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Shobikin bahwa sumber dana pembiayaan untuk PADE berasal dari APBD, program PADE merupakan Kerjasama Pihak Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Lamogan dengan KPDE Kabupaten Lamongan. Pernyataan beliau :

“ PADE ini merupakan kerjasama Pemdes dengan KPDE lamongan mas, jadi untuk pembiayaan ya semuanya ditanggung oleh APBD, pihak desa tidak mengeluarkan biaya apapun.” (Jumat 11 Maret 2016, pukul 08.40)

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diambil beberapa poin dasar dalam komponen organisasi

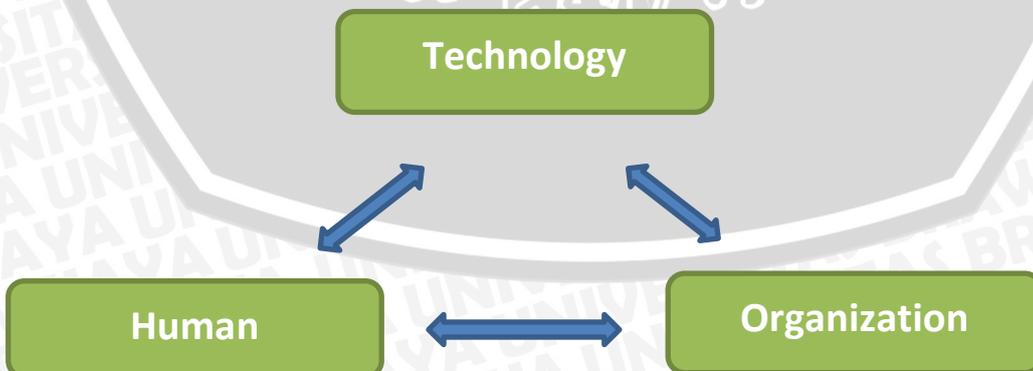
**Tabel 4.4 Temuan Dalam Komponen Organisasi**

Dimensi	Temuan
<b>Struktur Organisasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategi yang telah banyak disiapkan guna peningkatan sistem</li> <li>- Harapan yang tinggi terhadap sistem</li> <li>- Dukungan penuh top manajemen Inovasi yang selalu dikembangkan</li> </ul>
<b>Lingkungan Organisasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama yang baik antar stakeholder</li> <li>- Kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap PADE</li> </ul>

Sumber : Yusof (2013)

#### 4.4 Net Benefit

Net Benefit dalam HOT-Fit Model adalah manfaat yang dirasakan oleh individu maupun organisasi yang dapat di identifikasikan dari kesesuaian antara elemen *human*, *organization*, dan *technology*. Oleh karenanya, peneliti mencoba mengaitkan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Pada *Net Benefit* juga dilakukan wawancara kepada pihak yang terkait berdasarkan Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pengguna dan Lampiran 2 Pedoman Wawancara *Stakeholder* yang telah disesuaikan dengan kebutuhan komponen.



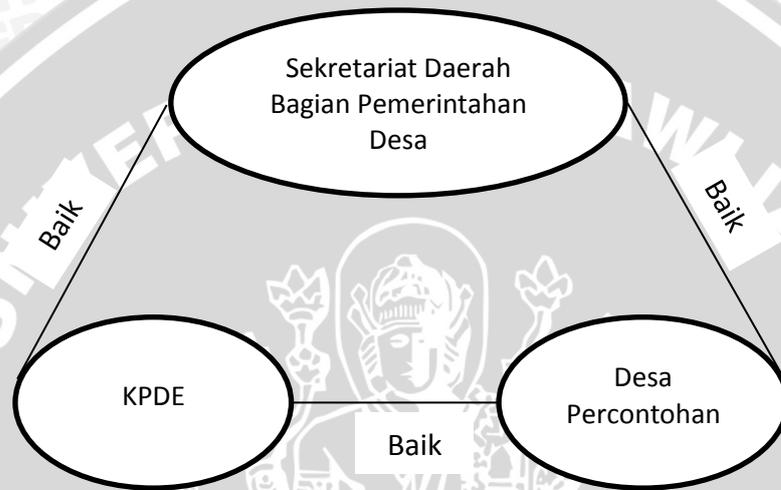
**Gambar 4.1 Kesesuaian Antar Komponen**

Sumber : Yusof (2013)

#### 4.4.1 *Fit Beetwen Human and Organization* (kesesuaian antara manusia dan organisasi)

Pada kesesuaian berikut dapat dilihat melalui hubungan yang terjalin antara manusia dengan organisasi, dalam kasus PADE peneliti melihat bagaimana keterkaitan antar organisasi dalam pengelolaan sistem PADE tersebut.

Hubungan antara pihak Setda Pemdes dengan Desa Brengkok sampai saat ini dikatakan cukup baik, hubungan Setda Pemdes dengan KPDE juga dapat dikatakan baik, begitu juga sebaliknya hubungan antara Desa Brengkok dengan KPDE Kabupaten Lamongan juga terjalin dengan baik.



**Gambar 4.2 Keterkaitan Antar Organisasi**  
Sumber : Perancangan

1. Hubungan antara Sekretariat Daerah bagian Pemerintahan Desa dengan Desa Brengkok

Hubungan yang terjalin antara Setda Pemdes dengan Desa Brengkok dapat dikatakan cukup baik, berikut merupakan pernyataan Bapak Teguh Wijono selaku Kasubag Tata Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sesuai dengan pertanyaan nomor 1c pada komponen net benefit pada Lampiran 2 Pedoman Wawancara *Stakeholder*:

“hubungan Pemdes dengan seluruh desa percontohan sangat baik mas, kami melakukan *monitoring* secara berkala ke seluruh desa yang menggunakan PADE, sehingga kalau terjadi *trouble* dapat sesegara mungkin kami atasi. Untuk Desa Brengkok sangat bagus mas, sudah sangat cepat dalam pengembangan PADE, Sekdesnya sempat beberapa kali ketemu saya untuk membicarakan gagasan-gagasan pengembangan PADE.” (Senin 14 Maret 2016, pukul 10.30)

2. Hubungan antara Sekretariat Daerah bagian Pemerintahan Desa dengan KPDE  
Hubungan antara Setda Pemdes dengan KPDE (Kantor Pengolahan Data Elektronik) selaku pihak yang berkerja sama dalam pembuatan sistem PADE tersebut juga dapat dikatakan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Teguh

Wijono selaku Kasubag Tata Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan pertanyaan nomor 1b pada Lampiran 2 Pedoman Wawancara *Stakeholder* bagian komponen Net Benefit.

“Kita dengan KPDE juga berkerjasama dengan baik mas, mengingat KPDE merupakan *fasilitator* dari PADE, jadi kita juga butuh *sharing* dalam mencapai tujuan dari si PADE ini sendiri. Sampai saat ini berjalan cukup lancar dan baik.” (Senin 14 Maret 2016, pukul 10.30)

### 3. Hubungan antara KPDE dengan Kantor Desa Brengkok

Hubungan KPDE dengan Desa memang tidak terlalu sering, namun KPDE juga tidak menutup diri dari sumbangsih desa dalam mengembangkan sistem PADE tersebut. berikut merupakan pernyataan perwakilan dari KPDE Kabupaten Lamongan berdasarkan pertanyaan nomor 1a pada Lampiran 2 Pedoman Wawancara *Stakeholder* bagian Net Benefit.

“Kami selalu membuka kesempatan kepada seluruh desa untuk berinteraksi dengan kami, sumbang saran maupun kesulitan yang dihadapi dalam menggunakan PADE akan selalu kami terima, kami juga siap membantu desa yang ingin melakukan penyesuaian sistem dengan kondisi dari desa tersebut.” (Rabu 16 Maret 2016, pukul 08.30).

Hal ini dipertegas dengan pernyataan bapak Shobikin selaku Sekretaris Desa Brengkok berdasarkan pertanyaan nomor 1b pada Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pengguna pada komponen *Net Benefit*:

“Porsi KPDE sangat pas mas, kami sempat beberapa kali bertemu untuk membicarakan PADE ya salah satunya mengenai penggunaan PADE didesa ini, berbeda dengan desa lain kan usernya banyak beliaunya sangat kooperatif dan mau membantu kami.” (Jumat 11 Maret 2016, pukul 08.40).

#### 4.4.2 *Fit Beetwen Human and Technology* (kesesuaian antara manusia dan teknologi)

Dimensi yang akan dilihat dari elemen ini adalah kesesuaian antara manusia dengan teknologi (*fit beetwen human and technology*). Dalam dimensi ini, melihat perbedaan layanan setelah diterapkannya PADE dan perubahan yang terjadi dari sistem manual yang mempermudah kinerja pegawai. Berikut merupakan pernyataan Bapak Shobikin tentang manfaat PADE yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik menjadi lebih efektif dan efisien yang mengacu pada pertanyaan nomor 2a dan 2b pada Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pengguna :

“Semenjak ada PADE pekerjaan kami semakin mudah, pelayanan juga semakin cepat sehingga masyarakat menjadi semakin puas dengan layanan yang kami berikan. Fitur-fitur yang cukup lengkap membuat data yang ada semakin rapi dan mudah untuk dikerjakan. Saya harap akan ada sistem-sistem lain yang dapat membantu seluruh pekerjaan di sektor desa supaya pelayanan lebih prima lagi.”(Jumat 11 Maret 2016, pukul 08.40)

Hal ini juga didukung dari pernyataan dari Bapak Teguh Wijono selaku Kasubag Tata Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan pertanyaan nomor 2a dan 2b pada Lampiran 2 Pedoman Wawancara *Stakeholder* :

“Tujuan dibuatnya PADE ini ya untuk memudahkan pekerjaan para staf di desa agar pelayanan yang terjadi disana lebih cepat, efektif dan efisien. Tidak perlu lagi bekerja secara manual” (Senin 14 Maret 2016, pukul 10.30)

**4.4.3 Fit Beetwen Organization and Technology (kesesuaian antara organisasi dan teknologi)**

Dimensi yang ketiga , adalah kesesuaian antara organisasi dengan teknologi yang dapat dilihat melalui strategi yang digunakan untuk menciptakan suatu layanan prima melalui PADE. Strategi lebih menitik beratkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti yang diungkapkan Bapak Teguh Wijono selaku Kasubag Tata Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan pertanyaan nomor 3a pada Lampiran 2 Pedoman Wawancara *Stakeholder* :

“Sampai saat ini Setda Pemdes sudah mengadakan kurang lebih 5 kali pelatihan mengenai operasional PADE kepada seluruh pengguna PADE, hal ini sangat perlu dilakukan mengingat usia para pengguna PADE yang tidak lagi muda sehingga harus pelan-pelan dalam pelatihan ini. Selain itu kami juga melakukan *monitoring* secara berkala guna menghindari adanya keterlambatan penanagan suatu kendala yang berakibat pada proses pelayanan publik.” (Senin 14 Maret 2016, pukul 10.30)

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan menjadi sebuah manfaat (*benefit*) yaitu PADE mampu mempermudah kinerja dari penggunanya, dan PADE juga mampu memberikan informasi data kependudukan yang cepat tanpa melalui proses yang rumit. Jika hal ini dikaitkan dengan tujuan diterapkannya PADE, maka tentu saja tujuan tersebut telah tercapai, karena tujuan tersebut telah terjawab dengan menggunakan HOT-Fit Model ini. Dengan kata lain penerapan PADE (Pengelolaan Administrasi Desa secara Elektronik) pada desa percontohan dalam penelitian kali ini berfokus pada Desa Brengkok Kecamatan Brondong telah sesuai dengan tujuan, walaupun masih terdapat kekurangan didalam segi kualitas sistem, dan pengetahuan pengguna.

Berdasarkan penjabaran diatas didapat beberapa poin yang sangat penting yang dapat mengetahui keterkaitan antar komponen yaitu manusia, organisasi dan teknologi. Didalam penggunaan sistem baru tidak hanya ada beberapa manfaat yang didapat namun tidak kurang juga terdapat beberapa kelemahan yang perlu untuk diperbaiki sedikit demi sedikit agar sistem yang baru dapat berjalan secara optimal, berikut merupakan poin-poin kelebihan dan kekurangan dari penggunaan PADE dalam alur birokrasi yang baru.

**Tabel 4.5 Fit Dan Missfit Pada PADE**

Hubungan	Fit	Dampak	Missfit	Dampak
----------	-----	--------	---------	--------



<b>Manusia dan Organisasi</b>	Mendekatkan hubungan kerjasama antar stakeholder  Dukungan stakeholder dalam penggunaan PADE	Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dalam mengembangkan PADE  Meningkatkan minat staff dalam menggunakan sistem	Berganti-gantinya pengurus  Kurangnya fasilitas penunjang sistem	Memperlambat kinerja sistem PADE secara optimal  Memperlambat peningkatan sistem
<b>Manusia dan Teknologi</b>	Perpindahan antara sistem manual ke sistem informasi  Meningkatnya kualitas layanan yang ada	Mempermudah pekerjaan staff dan meningkatkan pelayanan publik  Meningkatkan kepuasan pengguna karena kemudahan dan kecepatan yang didapat dari PADE	Tidak adanya koneksi yang menghubungkan sistem di kantor desa dengan data pusat  Interface PADE yang dirasa cukup sulit dipahami oleh staff	Menurunkan performa kualitas sistem dan kualitas informasi  Membatasi penggunaan sistem, tidak semua staff dapat menggunakan karena merasa canggung dan bingung dalam penggunaan PADE
<b>Organisasi dan Teknologi</b>	Berbagai strategi guna dapat mencapai tujuan dalam penggunaan PADE  Jaminan yang diberikan oleh stakeholder dalam penggunaan sistem	Meningkatkan performa sistem	Keragu-raguan top manajemen dalam berkomitmen	Memperlambat terbentuknya sistem yang optimal
<b>Manusia, Organisasi dan Teknologi</b>	Kualitas pelayanan yang jauh meningkat	Meningkatkan kepuasan pengguna	Tidak adanya khusus dalam	Keterbatasan pengguna

		terhadap layanan	penggunaan PADE	
--	--	------------------	-----------------	--

Sumber : Yusof (2013)

PADE masih akan dapat menjadi sistem yang diunggulkan dengan segala nilai keefektifannya dalam bidang membantu proses pelayanan publik. Berdasarkan penggunaannya yang dimulai pada tahun 2013 hingga sekarang terdapat peningkatan dari berbagai aspek yang sangat mendukung, sehingga tingkat kepuasan masyarakat juga semakin tinggi. Yusof et al (2008) menyatakan bahwa tingkat kesesuaian diantara tiga komponen yang ada yaitu manusia, organisasi, dan teknologi akan sangat penting dalam mengembangkan sebuah sistem informasi, dan yang peneliti perhatikan dalam berbagai kesempatan memang pada pelaksanaan PADE berikut pengguna(Manusia), *stakeholder* dalam hal ini Kepala Desa, KPDE, dan Pemdes (Organisasi) sama-sama memiliki tanggung jawab dan komitmen yang tinggi dalam pengembangan pelayanan yang ada, PADE merupakan langkah awal dalam proses peningkatan pelayanan tersebut. Menurut peneliti PADE akan sangat efektif bila pada keseluruhan level dari staf yang ada dapat memanfaatkannya dengan baik, bahkan mungkin masyarakat bisa dapat langsung menggunakannya tanpa perlu bantuan dari para staf lagi. PADE harus dapat segera menjadi sistem yang sempurna, yang dapat mencapai sebuah tujuan dari perencanaan awal, namun hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala dan masih terus dikembangkan secara berkala mengingat berikut merupakan sebuah *egovernment* yang memiliki pengaruh dari kebijakan sebuah pemerintahan.

Hampir seluruh pengguna yang ada pada Kantor Desa Brengkok merasakan perbedaan yang sangat signifikan dari proses pekerjaan mereka, mereka setuju bahwa semenjak adanya sistem PADE beban pekerjaan mereka menjadi lebih ringan, waktu pekerjaan mereka menjadi lebih singkat, meskipun mereka juga merasa proses dalam hal pengenalan dan pembelajaran penggunaan sistem sangat merepotkan diawal, namun hal itu tidak menurunkan nilai keinginan mereka dalam terus menggunakan PADE tersebut. Masyarakat sebagai pengguna akhir juga sangat merasa puas dengan kinerja pelayanan yang disajikan di kantor kepala desa yang menjadi lebih cepat dari tahun ke tahunnya hal tersebut tidak lain karena usaha peningkatan mutu yang dilakukan oleh kantor desa melalui sebuah pengambilan keputusan dalam kebijakan yang diterapkan oleh *stakholder* yang ada.

Peran dari keseluruhan *stakeholder* yang ada dari Kepala Desa Brengkok, pihak KPDE dan PemDes selaku pengembang sistem juga sangat baik dari tahun ke tahunnya. Tak henti-hentinya mereka memberikan kepercayaan kepada seluruh staf dalam penggunaan sistem. kepala desa memberikan sebuah kebijakan penggunaan sistem PADE, selalu melakukan evaluasi tentang penggunaan sistem bahkan tak jarang kantor desa harus menambahkan beberapa fasilitas pendukung secara mandiri guna meningkatkan kinerja PADE tersebut. sedangkan KPDE dan

Setda Pemdes juga selalu melakukan kontrol secara berkala jikalau terdapat kesalahan sistem yang dapat menghambat kinerja sistem PADE.



## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan evaluasi program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) dengan menggunakan kerangka HOT-Fit Model pada Kantor Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pada Elemen Teknologi

Meskipun masih terdapat banyak kekurangan pada elemen teknologi berikut namun, sampai sejauh ini teknologi yang digunakan yaitu program PADE dirasa telah cukup mumpuni untuk digunakan sehari-hari. Seluruh narasumber yang ada sepakat untuk meningkatkan kualitas dari PADE agar menjadi sistem yang mumpuni dan dapat dijadikan sebagai aplikasi prioritas dalam kinerja Kantor Desa Brengkok.

#### 2. Pada Elemen Manusia

Khusus untuk elemen berikut, diperlukan peningkatan yang cukup signifikan. Pengetahuan pengguna mengenai sistem informasi harus dapat lebih ditingkatkan, dengan cara diadakan pelatihan, seminar dan lain sebagainya. Kemampuan pengguna dalam mengelola sistem informasi khususnya PADE akan berdampak pada proses pelayanan yang diberikan oleh Kantor Desa Brengkok.

Pada dimensi kepuasan pengguna, dirasa masih sangat kurang, karena PADE belum dapat mencakup kebutuhan-kebutuhan spesifik pada setiap desa, sehingga kebutuhan regional per desa pun belum sepenuhnya tercapai. meskipun pihak TATA Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Lamongan telah memberikan kemudahan dalam melakukan penyesuaian sistem informasi, namun hal tersebut membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian.

#### 3. Pada Elemen Organisasi

Pada elemen organisasi, yaitu dimensi struktur berkaitan dengan kelembagaan dan komunikasi, sudah dijelaskan pihak-pihak yang berkait, mulai dari Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, KPDE, Pemerintah Desa Brengkok, serta masyarakat Desa Brengkok. Komunikasi yang dilakukan oleh ketiga pihak yaitu setda pemdes, KPDE, dan Desa Brengkok sendiri pun berjalan cukup baik, keluhan sekecil apapun yang dikemukakan oleh desa akan direspon dengan baik oleh Setda Pemdes dan KPDE begitupun sebaliknya.

Program Pengelolaan Administrasi Desa secara elektronik atau PADE merupakan program gagasan Pemerintah Daerah Lamongan melalui kerjasama antara Sekretariat Daerah Pemerintah Desa dengan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD kabupaten Lamongan.

#### 4. Pada Net Benefit

PADE mampu mempermudah kinerja dari penggunanya, dan PADE mampu memberikan informasi data kependudukan secara cepat dan akurat. Jika hal ini dikaitkan dengan tujuan PADE, tujuan tersebut telah tercapai dengan menggunakan HOT-Fit Model ini. Dengan kata lain, penerapan PADE di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan tujuan, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan mendasar dalam dimensi *Availability* (ketersediaan) dan pengetahuan.

Pada penelitian kali ini juga menguatkan penelitian sebelumnya bahwa metode Hot-Fit yang sejatinya pada pengenalan awal hanya digunakan sebagai evaluasi sistem informasi kesehatan, ternyata merupakan sebuah metode yang sangat fleksibel yang dapat digunakan juga dalam berbagai evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi dan kesesuaian tindakan yang diperlukan.

### 5.2 Saran

Terdapat beberapa poin saran yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Berdasarkan kebutuhan yang ditemukan peneliti, akan sangat lebih baik jika PADE dapat berjalan berdampingan dengan sistem lainnya. Sehingga pelayanan pemerintahan akan sangat lebih memudahkan masyarakat.
2. Mengingat bahwa PADE merupakan program perdana yang ditujukan untuk pihak Kantor Desa dan juga baru dijalankan untuk beberapa desa percontohan, maka dibutuhkan manajemen yang baik dalam proses pengawasan untuk memastikan sejauh mana PADE dapat berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. "Sistem Informasi Akutansi, Edisi Kedua, Cetakan Kelima". BPFE-Yogyakarta.Yogyakarta. 2000.
- Daranatha, S. "Sistem Informasi Akuntansi". Salemba Empat. Jakarta. 2009.
- Hall, J.A. "Sistem Informasi Akutansi". Salemba Empat. Jakarta. 2001.
- Hardiansyah. "Kualitas Pelayanan Publik". Gava Media . Yogyakarta.2011.
- Indrajit, R.E. "Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Politik Berbasis Teknologi Digital". Andi. Yogyakarta. 2002.
- Jogiyanto. "Sistem Teknologi Informasi". Penerbit Andi. Yogyakarta.2003.
- Jusuf, A.A. "Audit, Pendekatan Terpadu, Edisi Indonesia, Buku Satu". Salemba Empat. Jakarta. 1996.
- Krismiaji. " Sistem Informasi Akutansi". Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta. 2002.
- Kumorotomo, W & Subandono, A.M. "Sistem Informasi Manajemen". Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2009.
- McLeod, R. "Sistem Informasi Manajemen". Terjemahan Hadi Sukardi dan Agus Widyantoro. Prenhallindo. Jakarta. 2001.
- Moeloeng, L.J. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Remaja Rosdakarya. Bandung. 2010.
- Mulyadi. "Sistem Akutansi". Penerbit STIE YKPN. Yogyakarta. 1997.
- Nulayatna, T.F. "Evaluasi Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE) Melalui HOT-FIT Model Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan". Skripsi Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. 2016.
- Ratminto, dan Winarsih. "Manajemen Pelayanan". Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2005.
- Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif". Alfabeta. Bandung. 2012.
- Wahyono. "Memahami Internal Auditing". Harvarindo. Jakarta. 2008.
- Yusof, M.M, 2008. An Evaluation *Framework* for Health Information Systems: Human, Organization, and Technology-fit factors (HOT-Fit). International Journal of Medical Informatics, (<http://www.researchgate.net> diakses 21 November 2015).
- Yuli, A. "Evaluasi Sistem Informasi Akutansi pada Rumah Sakit Haji Jakarta". Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2004.
- Yusof, M.M & Yusuff, A.Y., 2013.EVALUATING E-Government System Effectiveness Using An Integrated Socio-Technical and Fit Approach: International Journal

Medical Informatics 12(5), (<http://search.proquest.com//> diakses 20 Juli 2016).



## LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA PENGGUNA

### Untuk Sekretaris Desa dan Kaur Umum Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

#### I. Teknologi

##### 1. Kualitas Sistem :

- a. Apakah PADE mudah digunakan?
- b. Bagaimana Keakuratan data masyarakat yang diolah oleh PADE?
- c. Apakah aplikasi PADE online dan terintegrasi dengan instansi lain yang terkait?

##### 2. Kualitas Informasi :

- a. Menurut anda, apakah data yang ada di PADE sudah menghasilkan informasi yang relevan dan berguna bagi instansi terkait?

##### 3. Kualitas layanan :

- a. Apakah terdapat peningkatan layanan setelah menerapkan PADE?
- b. Siapakah yang memiliki peran ketika Aparatur Desa tidak dapat mengatasi masalah aplikasi atau jaringan?

#### II. Manusia

##### 1. Pengguna Sistem :

- a. Siapa saja yang dapat menggunakan PADE pada Kantor Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

##### 2. Pengetahuan :

- a. Sejauh mana pengetahuan aparatur desa mengenai PADE?
- b. Apakah sering diadakan pelatihan mengenai PADE?

##### 3. Kepuasan Pengguna

- a. Apakah menurut anda, masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan PADE?

#### III. Organisasi

##### 1. Struktur Organisasi

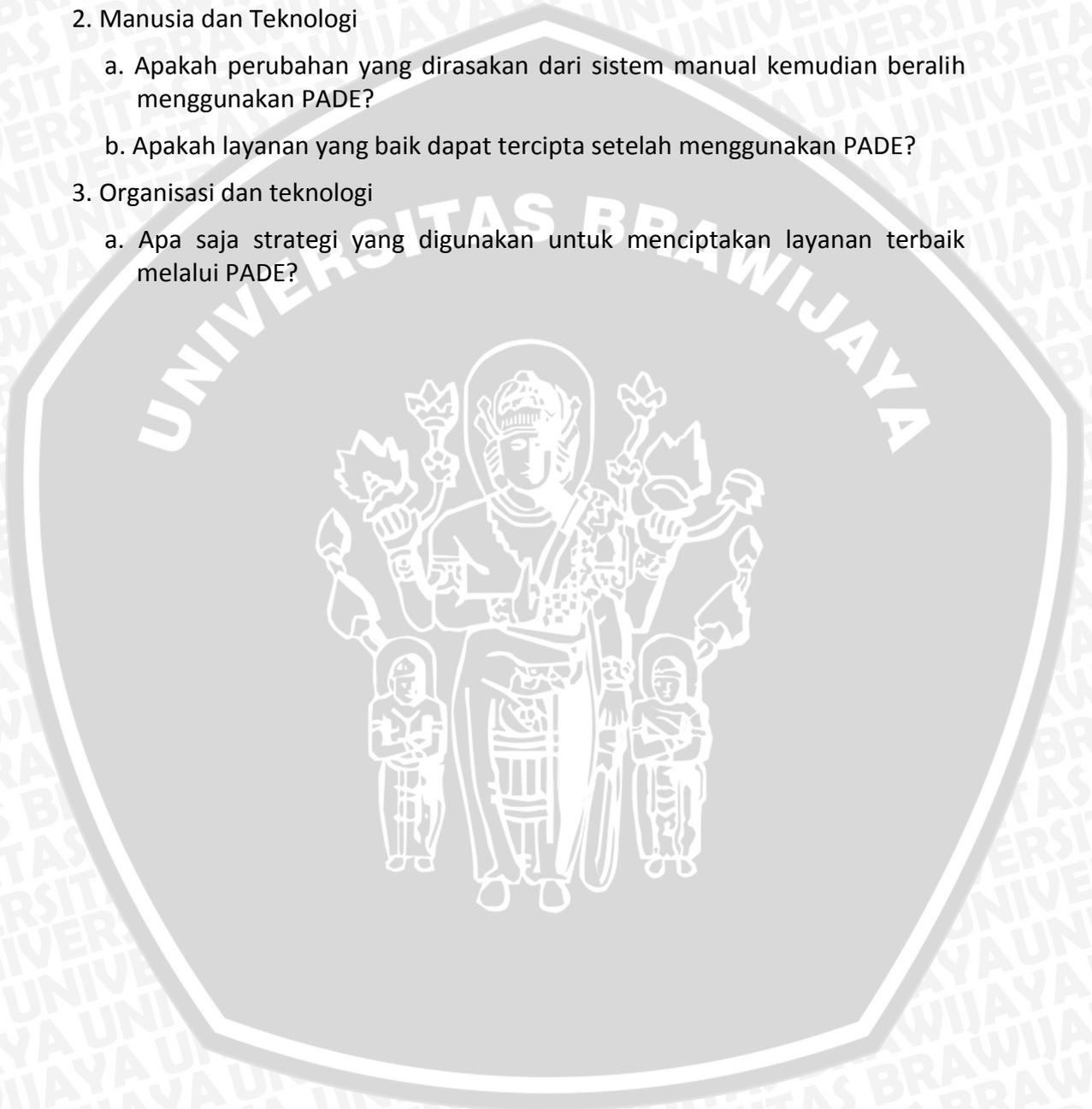
- a. kapan PADE mulia digagas?
- b. Bagaimana upaya aparatur Desa untuk mensosialisasikan PADE?

##### 2. Lingkungan

- a. Berasal dari mana dana yang digunakan untuk mendanai PADE?

#### IV. Net Benefit

1. Manusia dan Organisasi
  - a. Bagaimana hubungan antara Kantor Desa Brengkok dengan Setda Pemdes terkait pemanfaatan PADE?
  - b. Bagaimana hubungan antara Kantor Desa Brengkok dengan KPDE terkait pemanfaatan PADE?
2. Manusia dan Teknologi
  - a. Apakah perubahan yang dirasakan dari sistem manual kemudian beralih menggunakan PADE?
  - b. Apakah layanan yang baik dapat tercipta setelah menggunakan PADE?
3. Organisasi dan teknologi
  - a. Apa saja strategi yang digunakan untuk menciptakan layanan terbaik melalui PADE?



## LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA STAKEHOLDER

### Untuk Sekretariat Daerah Pemerintahan Desa dan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Lamongan

#### I. Teknologi

##### 1. Kualitas Sistem :

- a. Apakah PADE mudah digunakan?
- b. Apakah aplikasi PADE online dan terintegrasi dengan instansi lain yang terkait?

##### 2. Kualitas Layanan :

- a. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi permasalahan pada aplikasi atau jaringan?

#### II. Manusia

##### 1. Penggunaan Sistem

- a. Sejauh mana pelatihan mengenai penggunaan PADE pada aparaturnya desa?

#### III. Organisasi

##### 1. Struktur

- a. Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan PADE?
- b. Apakah Setda Pemdes/ KPDE selaku instansi yang menaungi program PADE sering melakukan monitoring terkait PADE ?

##### 2. Lingkungan

- a. Berasal dari mana dana yang digunakan untuk mendanai PADE?
- b. Apakah penerapan PADE sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik di Kabupaten Lamongan?

#### IV. Net Benefit

##### 1. Manusia dan Organisasi

- a. Bagaimana peran KPDE bersama aparaturnya Desa terkait pengembangan PADE?
- b. Bagaimana KPDE dengan Setda Pemdes dalam pengembangan PADE?
- c. Bagaimana Setda Pemdes bersama aparaturnya Desa terkait pengembangan PADE?

##### 2. Manusia dan Teknologi

- a. Apakah tujuan dari penerapan PADE?

b. bagaimana kinerja PADE?

3. Organisasi dan teknologi

a. Apa saja strategi yang digunakan untuk menciptakan layanan terbaik melalui PADE?

